

**PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
DI SEKOLAH DASAR NEGERI NGROJO
NANGGULAN KULON PROGO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan



Oleh
Hanifah Yuliani
NIM 11101241020

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN
JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
JUNI 2016**

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul “PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR NEGERI NGROJO NANGGULAN KULON PROGO” yang disusun oleh Hanifah Yuliani, NIM 11101241020 ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan.

Yogyakarta, 4 Mei 2016



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Tanda tangan yang tertera dalam halaman pengesahan adalah asli. Jika tidak asli, saya siap menerima sanksi tunda yudisium pada periode berikutnya.



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR NEGERI NGROJO NANGGULAN KULON PROGO" yang disusun oleh Hanifah Yuliani, NIM 11101241020 ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Mei 2016 dan dinyatakan lulus.

DEWAN PENGUJI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
MD. Niron, M.Pd.	Ketua Penguji		9/6 2016
Sudiyono, M.Si.	Sekretaris Penguji		9/6 2016
Prof. Dr. Farida Hanum, M.Si.	Penguji Utama		3/6 2016



MOTTO

Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan/diperbuatnya.

(Ali Bin Abi Thalib)

Bekerjalah bagaikan tak butuh uang. Mencintailah bagaikan tak pernah disakiti.

Menarilah bagaikan tak seorang pun sedang menonton.

(Mark Twain)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, karya ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua, Bapak dan Ibu tercinta.
2. Universitas Negeri Yogyakarta.
3. Nusa, Bangsa, dan Negara.

**PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
DI SEKOLAH DASAR NEGERI NGROJO
NANGGULAN KULON PROGO**

Oleh
Hanifah Yuliani
NIM 11101241020

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pembiayaan pendidikan dan hambatan dalam pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo Tahun Ajaran 2015/2016.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian ini adalah kepala sekolah dan bendahara sekolah. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi teknik dan sumber. Data dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo Tahun Ajaran 2015/2016 berasal dari BOS Pusat/ BOS Reguler, BOS Provinsi/ BOSDA, dan BOS Kabupaten dengan jumlah Rp 40.180.000,00 yang pengalokasianya digunakan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan, diantaranya Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan, dan Standar Penilaian Pendidikan, kecuali Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Namun pada kenyataannya, terdapat ketidaksesuaian antara pembiayaan yang tertuang dalam RKAS dengan hasil pelaksanaannya. 2) Hambatan dalam pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo yaitu terbatasnya dana yang diterima dari pemerintah, sekolah tidak dapat melakukan pungutan terhadap orang tua siswa, serta sedikitnya jumlah siswa.

Kata Kunci: *pembiayaan pendidikan, BOS, pengalokasian dana*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis masih diberikan kesempatan, kekuatan, kesabaran, dan kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pembentukan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Ngrojo Nanggulan Kulon Progo” ini dengan lancar. Penulis menyadari bahwa selesainya tugas akhir skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan yang telah memberikan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Ketua Jurusan Administrasi Pendidikan yang telah memberi kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.
3. MD. Niron, M.Pd. selaku pembimbing penulisan tugas akhir skripsi yang dengan sabar telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan memberi pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta yang telah mengajarkan ilmu pengetahuannya.
5. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ilmu Pendidikan, yang telah membantu demi kelancaran penyelesaian skripsi ini.
6. Keluarga Besar SD Negeri Ngrojo, terima kasih atas waktu dan kerjasama yang telah diberikan selama proses penelitian.

7. Kedua orangtua tercinta yang selalu memberikan doa, perhatian, kasih sayang, serta dukungannya.
8. Kedua adikku tersayang Fida Fadhilatu Tsani dan Dellanisa Rizqi Aziza, yang telah menjadi penyemangat dan motivasi dalam menyusun tugas akhir skripsi.
9. Sahabat-sahabatku (Annisa, Zulfa, Dika Resti, Saras, Dita Estu, Dika, Yuli, Arum, Anggi, Indah) yang telah memberikan semangat, kasih sayang, dukungan, tempat berbagi pendapat dan suka duka dalam penyusunan skripsi ini serta teman-teman seperjuangan “*Venome Albone*” MP.A 2011, terimakasih atas segenap rasa hangat, rasa kekeluargaan, rasa keakraban dan kenangannya.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan bantuan selama penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, Juni 2016

Penulis



Hanifah Yuliani
NIM. 11101241020

DAFTAR ISI

	hal.
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESEAHAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	9

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pembiayaan Pendidikan	10
1. Pengertian Pembiayaan Pendidikan.....	10
2. Karakteristik Pembiayaan Pendidikan.....	13
3. Jenis Biaya Pendidikan	13
4. Sumber Dana Pendidikan	19
5. Dasar Hukum Pembiayaan Pendidikan	23
6. Model-model Pembiayaan Pendidikan.....	27

B. Sekolah Dasar	33
1. Pengertian Sekolah Dasar	33
2. Pembiayaan Pendidikan di Sekolah Dasar	35
C. Kajian Empirik (Penelitian yang Relevan)	37
D. Kerangka Pikir Penelitian	40
E. Pertanyaan Penelitian	41
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	43
B. Tempat dan Waktu Penelitian	43
C. Informan Penelitian	44
D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Instrumen Penelitian	46
F. Keabsahan Data	48
G. Teknik Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	53
1. Profil Sekolah	53
2. Visi dan Misi Sekolah	54
3. Keadaan Peserta Didik Tahun Ajaran 2015/2016	55
4. Keadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	56
5. Keadaan Sarana dan Prasarana Sekolah	57
6. Struktur Organisasi Sekolah	58
B. Hasil Penelitian	58
1. Pembiayaan Pendidikan di SD Negeri Ngrojo Tahun Ajaran 2015/2016	58
2. Hambatan yang Dihadapi dalam Pembiayaan Pendidikan di SD Negeri Ngrojo Tahun Ajaran 2015/2016.....	65
C. Pembahasan	71
1. Pembiayaan Pendidikan di SD Negeri Ngrojo Tahun Ajaran 2015/2016	71
2. Hambatan yang Dihadapi dalam Pembiayaan Pendidikan di SD Negeri Ngrojo Tahun Ajaran 2015/2016.....	83

D. Keterbatasan Penelitian	86
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	91

DAFTAR TABEL

	hal.
Tabel 1. Kisi-kisi Pedoman Wawancara	47
Tabel 2. Kisi-kisi Pedoman Observasi	48
Tabel 3. Kisi-kisi Pedoman Dokumentasi	48

DAFTAR GAMBAR

	hal.
Gambar 1. Kerangka Pikir Peneliti	41
Gambar 2. Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman.....	51
Gambar 3. Struktur Organisasi Sekolah.....	58

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal.
Lampiran 1. Daftar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	92
Lampiran 2. Keadaan Peserta Didik Tahun Ajaran 2015/2016	93
Lampiran 3. RKAS Tahun Ajaran 2015/2016 SD Negeri Ngrojo.....	94
Lampiran 4. RAPBS Tahun Ajaran 2015/2016 SD Negeri Ngrojo.....	98
Lampiran 5. APBS Tahun Ajaran 2015/2016 SD Negeri Ngrojo.....	102
Lampiran 6. Surat Izin dan Surat Keterangan Penelitian.....	106
Lampiran 7. Pedoman Wawancara	110
Lampiran 8. Pedoman Observasi	111
Lampiran 9. Pedoman Dokumentasi	112
Lampiran 10. Analisis Data	113
Lampiran 11. Dokumentasi Foto	144

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hak bagi setiap individu, hal ini sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Adapun Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 menyatakan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan mutlak diperlukan oleh semua warga negara sebagaimana amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia sendiri yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan dikatakan berhasil apabila dapat menciptakan manusia yang memiliki kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik yang baik. Kemampuan-kemampuan tersebut tercermin dalam realitas kehidupan yang menunjukkan sejauh mana kualitas individu tersebut sebagai hasil dari pendidikan yang diperolehnya.

Sekolah sebagai salah satu tempat penyelenggaraan pendidikan tentunya perlu memperhatikan beberapa komponen, diantaranya sarana prasarana, tenaga pendidik, kurikulum, pembiayaan, dan peserta didik, serta komponen lain yang

terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Komponen-komponen tersebut sangat penting dan saling berpengaruh sehingga dapat memberikan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal menuntut sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sebuah lembaga pendidikan yang bermutu tidak terlepas dari keadaan pembiayaan pendidikan di dalamnya, karena pada dasarnya mutu pendidikan berbanding lurus dengan biaya pendidikan yang dikeluarkan. Semakin tinggi biaya pendidikan yang digunakan dan dikeluarkan maka semakin baik pula layanan pendidikan tersebut, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang bermutu. Pembiayaan pendidikan yang baik adalah pembiayaan yang mampu memenuhi semua kebutuhan berdasarkan anggaran yang telah dibuat. Untuk dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan anggaran yang telah dibuat, diperlukan kemampuan mengelola yang baik.

Pembiayaan pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/ kota). Hal tersebut sebagaimana yang telah diatur pada beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional diantaranya pada Pasal 11 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun. Kemudian pada pasal 12 Ayat 1

disebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Di samping itu, disebutkan pula pada Pasal 12 Ayat 2 bahwa setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku. Pasal 49 Ayat 1 menyatakan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adanya anggaran pendidikan tersebut diharapkan bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan telah menegaskan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Agar penyelenggaraan pendidikan di sekolah dapat berjalan dengan baik, maka harus ada ketersediaan dana yang mencukupi. Ketidakmampuan sekolah dalam menyediakan dana dikhawatirkan akan menghambat proses penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat harus menyadari serta melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya dalam hal pembiayaan pendidikan agar dapat terselenggara dengan baik. Selain itu, pemerintah dan juga masyarakat harus turut serta dalam mengawasi jalannya pembiayaan

pendidikan di sekolah-sekolah agar berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan.

Pembiayaan pendidikan menjadi masalah yang penting dalam keseluruhan penyelenggaraan pendidikan. Hal ini karena pembiayaan menyangkut masalah tenaga pendidik, sarana prasarana, proses pembelajaran, dan aspek-aspek lainnya yang berhubungan dengan keuangan. Meskipun masalah pembiayaan tersebut tidak sepenuhnya berpengaruh langsung terhadap kualitas pendidikan, namun pembiayaan berkaitan dengan komponen yang ada di dalamnya. Banyak sekolah yang tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara optimal karena masalah keuangan, baik untuk menggaji guru maupun untuk mengadakan sarana dan prasarana pembelajaran.

Pembiayaan pendidikan pada dasarnya merupakan suatu proses mengalokasikan sumber-sumber pada kegiatan-kegiatan atau program-program pelaksanaan operasional pendidikan atau dalam proses belajar mengajar di kelas (Matin, 2014: 4). Kegiatan mengalokasikan dana pada pelaksanaan operasional pendidikan merupakan kegiatan yang sangat kompleks, oleh karena itu dibutuhkan pengelolaan yang terencana oleh orang-orang yang berkompeten. Jika hal tersebut tidak terpenuhi maka akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat penyelenggaraan pendidikan. Beberapa masalah yang sering terjadi dalam pembiayaan pendidikan antara lain sumber dana yang terbatas, tidak meratanya dana pendidikan yang diterima dari pemerintah, kurang transparannya pembiayaan pendidikan di sekolah-sekolah, serta pembiayaan yang tidak dikelola dengan

baik yang bisa disebabkan karena kurang berkompetennya pengelola dana di sekolah. Tidak meratanya dana pendidikan yang diterima dari pemerintah menyebabkan terjadinya kesenjangan dilihat dari sarana prasarana dan kualitas peserta didik antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Masalah transparansi pembiayaan juga rawan terjadi terlebih pada sekolah-sekolah yang memperoleh dana pendidikan dalam jumlah besar. Hal ini bisa jadi disebabkan karena adanya penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Kompetensi pengelola dalam melaksanakan pembiayaan juga dapat menjadi masalah, sehingga menyebabkan dana yang diterima tidak terkelola dengan baik. Misalnya terjadi manipulasi anggaran maupun laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dari beberapa permasalahan dalam pembiayaan pendidikan tersebut hendaknya pemerintah mencari solusi maupun tindakan pencegahan agar hal-hal tersebut tidak terjadi. Anggaran pendidikan yang disalurkan ke sekolah-sekolah hendaknya juga memperhatikan perkembangan masing-masing sekolah dari tahun ke tahun, sehingga sekolah yang sudah memiliki sarana prasarana dan mutu yang baik lebih dikontrol pengembangannya agar dananya dapat dialihkan ke sekolah yang belum memiliki mutu yang baik.

Pada tingkat satuan pendidikan atau sekolah, pembiayaan pendidikan diperoleh dari subsidi pemerintah pusat, pemerintah daerah, iuran siswa, dan sumbangan masyarakat. Namun, untuk sekolah-sekolah negeri pada jenjang pendidikan dasar dan menengah (SMP) tidak diperkenankan melakukan pungutan apapun terhadap orang tua siswa terkait dengan pemenuhan

kebutuhan operasional sekolah. Sekolah-sekolah dasar dan menengah pertama saat ini tidak memungut biaya pendidikan dari orangtua siswa karena dana pendidikannya sudah ditanggung oleh pemerintah.

SD Negeri Ngrojo merupakan salah satu jenjang pendidikan dasar yang beralamat di Ngrojo, Kembang, Nanggulan, Kulon Progo. SD Negeri Ngrojo menyelenggarakan pendidikan gratis untuk semua kalangan. Tidak hanya untuk siswa miskin saja, tetapi seluruh siswa yang bersekolah di SD Negeri Ngrojo tidak dipungut biaya pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dalam studi penjajakan pada awal bulan Oktober 2015 di SD Negeri Ngrojo ditemukan beberapa permasalahan. Jumlah pendaftar di SD Negeri Ngrojo pada tahun ajaran 2015/2016 ini tidak mampu memenuhi kuota penerimaan peserta didik baru (PPDB), sehingga sekolah tidak perlu melakukan seleksi berdasarkan usia. SD Negeri Ngrojo hanya mampu menerima 2 (dua) peserta didik baru pada tahun ajaran 2015/2016 ini dan total peserta didik pada tahun ajaran ini hanya berjumlah 34 anak. Padahal dengan terbatasnya jumlah peserta didik akan mempengaruhi besarnya dana dari pemerintah yang diterima oleh sekolah. Sedikitnya jumlah peserta didik di sekolah ini menyebabkan dana yang diterima dari pemerintah juga terbatas. Meskipun begitu, dengan terbatasnya dana yang diterima, sekolah ini tetap memiliki sarana dan prasarana yang memadai dan bangunan fisiknya terlihat bagus.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dikemukakan tersebut, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai

pembentukan pendidikan di SD Negeri Ngrojo. SD Negeri Ngrojo merupakan sekolah dasar negeri yang mengalami kekurangan peserta didik. Keadaan tersebut menimbulkan pertanyaan bagi peneliti mengenai bagaimana pembentukan pendidikan yang ada di sekolah tersebut dapat terlaksana guna memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan pendidikan. Terlebih mengingat bahwa sumber dana di sekolah dasar berasal dari pemerintah dan besarnya dana bantuan ditentukan oleh banyaknya jumlah peserta didik.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut.

1. Sumber dana pendidikan yang terbatas.
2. Tidak merata dana pendidikan yang diterima dari pemerintah.
3. Kurang transparannya pembentukan pendidikan di sekolah-sekolah.
4. Pembentukan yang tidak dikelola dengan baik yang bisa disebabkan karena kurang berkompetennya pengelola dana di sekolah.
5. Sedikitnya jumlah peserta didik di SD Negeri Ngrojo menyebabkan dana yang diterima dari pemerintah juga terbatas.
6. Meskipun dana yang diterima terbatas, SD Negeri Ngrojo tetap memiliki sarana dan prasarana yang memadai dan bangunan fisiknya terlihat bagus.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti membatasi permasalahan yang diteliti yaitu pada pemberian pendidikan di SD Negeri Ngrojo tahun ajaran 2015/2016.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pemberian pendidikan di SD Negeri Ngrojo tahun ajaran 2015/2016?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pemberian pendidikan di SD Negeri Ngrojo tahun ajaran 2015/2016?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan:

1. Pemberian pendidikan di SD Negeri Ngrojo tahun ajaran 2015/2016.
2. Hambatan yang dihadapi dalam pemberian pendidikan di SD Negeri Ngrojo tahun ajaran 2015/2016.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi manajemen pendidikan, khususnya manajemen keuangan mengenai pembiayaan pendidikan dan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melaksanakan penelitian mengenai pembiayaan pendidikan di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Dinas Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta masukan dalam menentukan kebijakan mengenai pembiayaan pendidikan yang ada di sekolah.

b. Bagi Sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pembiayaan pendidikan serta menjadi bahan rujukan untuk meningkatkan pembiayaan pendidikan sehingga pelaksanaan berikutnya menjadi lebih baik. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap sekolah lain tentang pembiayaan pendidikan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pembiayaan Pendidikan

1. Pengertian Pembiayaan Pendidikan

Setiap kegiatan memerlukan biaya. Proses penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan perlu didukung dengan biaya yang memadai sehingga akan menjamin kelancaran berbagai kegiatan yang diselenggarakan. Harsono (2007: 9) berpendapat bahwa biaya pendidikan adalah semua pengeluaran yang memiliki kaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan. Pengeluaran yang tidak memiliki kaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan dapat disebut sebagai pemborosan, atau pengeluaran yang mestinya dapat dicegah.

Pendapat lain dikemukakan oleh Matin (2014: 8) yang menyatakan bahwa biaya pendidikan adalah seluruh pengeluaran baik yang berupa uang maupun bukan uang sebagai ungkapan rasa tanggung jawab semua pihak (masyarakat, orang tua, dan pemerintah) terhadap pembangunan pendidikan agar tujuan pendidikan yang dicita-citakan tercapai secara efisien dan efektif, yang harus terus digali dari berbagai sumber, dipelihara, dikonsolidasikan, dan ditata secara administratif sehingga dapat digunakan secara efisien dan efektif. Berdasarkan pengertian tersebut, biaya pendidikan sebenarnya tidak selalu identik dengan uang, melainkan juga berkaitan dengan segala sesuatu yang diberikan untuk setiap aktivitas dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan.

Dari kedua pendapat mengenai biaya pendidikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa biaya pendidikan adalah pengeluaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan baik berupa uang maupun bukan uang untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.

Sementara itu mengenai pembiayaan pendidikan, Uhar Suharsaputra (2013: 289) berpendapat bahwa pembiayaan pendidikan dapat diartikan sebagai kajian tentang bagaimana pendidikan dibiaya, siapa yang membiayai serta siapa yang perlu dibiayai dalam suatu proses pendidikan. Pengertian ini mengandung dua hal yaitu berkaitan dengan sumber pembiayaan dan alokasi pembiayaan pendidikan. Sedangkan Manuel Zymelman (1975) dalam Moch. Idochi Anwar (2013: 109) mengungkapkan bahwa pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut analisa sumber-sumber saja, tetapi juga penggunaan dana-dana secara efisien. Makin efisien sistem pendidikan itu makin kurang pula dana yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuannya, dan karena itu lebih banyak yang dicapai dengan anggaran yang tersedia.

Pengertian lain, Suryosubroto (2004: 26) berpendapat bahwa pembiayaan sekolah adalah kegiatan mendapatkan biaya serta mengelola anggaran pendapatan dan belanja menengah. Kegiatan ini dimulai dari perencanaan biaya, usaha untuk mendapatkan dana yang mendukung perencanaan, serta pengawasan penggunaan anggaran.

Dari beberapa pendapat mengenai pembiayaan pendidikan, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan kajian mengenai

sumber-sumber dana dan pengalokasiannya yang diperlukan untuk berbagai keperluan dalam penyelenggaraan pendidikan. Alokasi dana pendidikan harus mengacu pada tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa biaya pendidikan berbeda dengan pembiayaan pendidikan. Biaya pendidikan merupakan besarnya dana yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pembiayaan pendidikan merupakan keseluruhan pembiayaan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi darimana saja dana diperoleh dan untuk apa saja dana itu digunakan. Pembiayaan pendidikan berarti kegiatan yang ditempuh dalam rangka pencarian sumber dana dan pendistribusinya untuk kepeluan penyelenggaraan proses pendidikan.

Menurut Sri Minarti (2011: 238) pelaksanaan pembiayaan secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam dua kegiatan berikut.

- a. Penerimaan pembiayaan pendidikan sekolah dari sumber-sumber dana perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan ketetapan yang disepakati. Sedangkan, sumber dana tersebut meliputi anggaran rutin, anggaran pembangunan, anggaran penunjang pendidikan, dana masyarakat, donatur, dan lain-lain.
- b. Pengeluaran, yakni dana yang sudah diperoleh dari berbagai sumber perlu digunakan secara efektif dan efisien. Artinya, perolehan dana dalam pengeluarannya harus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang telah disesuaikan dalam perencanaan pembiayaan pendidikan di sekolah.

Dari pendapat Sri Minarti tersebut, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembiayaan meliputi kegiatan penerimaan dan pengeluaran. Pengeluaran pendidikan dilakukan dari penerimaan pembiayaan pendidikan dimana kegiatan tersebut se bisa mungkin dilakukan secara efektif dan efisien untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

2. Karakteristik Pembiayaan Pendidikan

Menurut Tatang M. Amirin, dkk (2010: 89) karakteristik atau ciri-ciri pembiayaan pendidikan adalah sebagai berikut.

- a. Biaya pendidikan selalu naik, perhitungan pembiayaan pendidikan dinyatakan dalam satuan *unit cost*, yang meliputi:
 - 1) *Unit cost* lengkap, yaitu perhitungan *unit cost* berdasarkan semua fasilitas yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan.
 - 2) *Unit cost* setengah lengkap, hanya memperhitungkan biaya kebutuhan yang berkenaan dengan bahan dan alat yang berangsurnya habis walaupun jangka waktunya berbeda.
 - 3) *Unit cost* sempit, yaitu *unit cost* yang diperoleh hanya dengan memperhitungkan biaya yang langsung berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar.
- b. Biaya terbesar dalam pelaksanaan pendidikan adalah biaya pada faktor manusia. Pendidikan dapat dikatakan sebagai “*human investent*”, artinya biaya terbesar diserap oleh tenaga manusia.
- c. *Unit cost* pendidikan akan naik sepadan dengan tingkat sekolah.
- d. *Unit cost* pendidikan dipengaruhi oleh jenis lembaga pendidikan. Biaya untuk sekolah kejuruan lebih besar daripada biaya untuk sekolah umum.
- e. Komponen yang dibiayai dalam sistem pendidikan hampir sama dari tahun ke tahun.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa karakteristik pembiayaan pendidikan antara lain biaya pendidikan selalu naik sepadan dengan jenjang pendidikan, biaya terbesar terletak pada faktor manusia, dan komponen yang dibiayai dalam sistem pendidikan hampir sama dari ke tahun ke tahun.

3. Jenis Biaya Pendidikan

Salah satu hal yang merupakan konsep penting dalam pembiayaan pendidikan adalah masalah biaya pendidikan yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 62 mengelompokkan biaya pendidikan menjadi tiga, yaitu:

a. Biaya Investasi

Biaya investasi meliputi biaya:

- 1) Penyediaan sarana dan prasarana
- 2) Pengembangan sumber daya manusia
- 3) Modal kerja tetap

b. Biaya Operasi

Biaya operasi meliputi:

- 1) Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
- 2) Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai
- 3) Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lain sebagainya.

c. Biaya Personal

Biaya personal merupakan biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 3 biaya pendidikan digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu:

a. Biaya Satuan Pendidikan

Biaya satuan pendidikan terdiri dari:

1) Biaya investasi yang terdiri atas:

a) Biaya investasi lahan pendidikan

b) Biaya investasi selain lahan pendidikan

2) Biaya operasional yang terdiri atas:

a) Biaya personalia

b) Biaya non personalia

3) Bantuan biaya pendidikan yaitu dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.

4) Beasiswa

Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.

b. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan

Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan meliputi:

1) Biaya investasi yang terdiri dari:

a) Biaya investasi lahan pendidikan

b) Biaya investasi selain lahan pendidikan

2) Biaya operasi yang terdiri dari:

a) Biaya personalia

b) Biaya nonpersonalia

c. Biaya pribadi peserta didik

Menurut Uhar Suharsaputra (2013: 289) biaya pada lembaga pendidikan biasanya meliputi:

a. *Direct cost* dan *indirect cost*

Direct cost (biaya langsung) yaitu biaya yang langsung berproses dalam produksi pendidikan dimana biaya pendidikan ini secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. Biaya langsung ini meliputi gaji guru dan personil lainnya, pembelian buku, fasilitas kegiatan belajar mengajar, alat laboratorium, buku pelajaran, buku perpustakaan, dan lain-lain. Sementar itu, *indirect cost* (biaya tidak langsung) meliputi biaya hidup, transportasi, dan biaya-biaya lainnya.

b. *Sosial cost* dan *private cost*

Sosial cost dapat dikatakan sebagai biaya publik, yaitu sejumlah biaya sekolah yang harus dibayar oleh masyarakat. Sedangkan *private cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk membiayai sekolah anaknya, dan termasuk di dalamnya *forgone opportunities* (biaya kesempatan yang hilang).

Sementara itu, menurut Sri Minarti (2011: 222) berdasarkan fungsinya, biaya dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Biaya administrasi, yaitu biaya-biaya untuk melaksanakan dan mendukung kegiatan proses belajar mengajar, seperti gaji kepala sekolah, gaji guru, gaji staf administrasi, pembelian buku, fokopi, alat-alat tulis, dan sebagainya.

- b. Biaya umum, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan umum, seperti biaya pemeliharaan gedung, peralatan sekolah, biaya penyusutan, biaya listrik, dan telepon.
- c. Biaya promosi, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka mempromosikan sekolah, seperti biaya pembuatan pamflet atau brosur, biaya tenaga promosi, dan biaya iklan radio atau koran.

Sementara itu, menurut Mulyono (2010: 24) biaya bugetair sekolah meliputi biaya rutin, biaya operasional dan biaya pembangunan atau investasi. Biaya rutin adalah biaya yang harus dikeluarkan dari tahun ke tahun seperti gaji pegawai (guru dan non guru), biaya operasional yaitu biaya untuk pemeliharaan gedung, fasilitas, dan alat-alat pelajaran (bahan habis pakai) serta biaya pembangunan atau investasi yang meliputi biaya pembelian tanah, pembangunan gedung, perbaikan atau rehab gedung, penambahan furnitur dan barang yang tidak habis pakai. Selanjutnya, menurut Dedi Supriadi (2003: 4) dalam teori dan praktik pembiayaan pendidikan baik pada tataran makro dan mikro, biaya pendidikan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- a. Biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*)

Biaya langsung adalah segala pengeluaran yang secara langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan. Biaya tidak langsung adalah pengeluaran yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi, misalnya biaya

hidup mahasiswa, biaya transportasi, biaya jajan, biaya kesehatan, harga kesempatan (*opportunity cost*).

b. Biaya pribadi (*privat cost*) dan biaya sosial (*sosial cost*)

Biaya pribadi adalah pengeluaran keluarga untuk pendidikan atau dikenal juga dengan pengeluaran rumah tangga (*household expenditure*). Biaya sosial adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk pendidikan, baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan. Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah pada dasarnya merupakan biaya sosial.

c. Biaya dalam bentuk uang (*monetary cost*) dan bukan uang (*non-monetary cost*)

Harsono (2007: 9) menggolongkan biaya pendidikan menurut sumbernya menjadi 4 jenis, yaitu biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua/ wali siswa, masyarakat bukan orang tua/ wali siswa dan lembaga pendidikan itu sendiri. Pendapatan sekolah yang berasal dari pemerintah pusat maupun daerah (propinsi dan kabupaten) diperoleh dengan cara sekolah mengajukan proposal ke pemerintah baik pusat maupun daerah. Pendapatan sekolah yang berasal dari orang tua/wali siswa diperoleh dari SPP dan insidental, yang berasal dari masyarakat bukan orang tua/ wali siswa berupa sumbangan sukarela dari masyarakat yang peduli dengan perkembangan sekolah, sedangkan yang bersumber dari lembaga pendidikan itu sendiri berupa unit produksi sekolah itu sendiri.

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa biaya pendidikan dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu Biaya Satuan Pendidikan, Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Biaya Personal. Biaya Satuan terdiri dari Biaya Investasi, Biaya Operasi, Bantuan Biaya Pendidikan, dan Beasiswa. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan meliputi Biaya Investasi Lahan Pendidikan dan Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan. Biaya Operasi meliputi biaya Operasi Personalia (gaji pendidik dan tenaga kependidikan) dan Biaya Operasi Nonpersonalia. Biaya pendidikan dapat bersifat pribadimaupun sosial tergantung dari pihak yang mengeluarkan biaya. Biaya pendidikan yang berkaitan langsung dengan pendidikan disebut biaya langsung dan biaya pendidikan yang tidak berkaitan langsung dengan pendidikan disebut biaya tidak langsung.

4. Sumber Dana Pendidikan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan telah menegaskan bahwa dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. Besarnya dana yang diterima setiap sekolah bergantung pada sumber dana. Sumber dana pendidikan merupakan pihak-pihak yang memberikan bantuan subsidi dan sumbangan kepada lembaga pendidikan. Nanang Fattah (2004: 113) menjelaskan bahwa sumber dana pendidikan adalah pihak-pihak yang memberikan bantuan subsidi dan sumbangan yang diterima setiap tahun oleh lembaga sekolah dari lembaga sumber resmi dan diterima secara teratur. Adapun sumber penerimaan

tersebut terdiri dari pemerintah pusat (APBN), pemerintah daerah (APBD), orang tua murid (BIP3), dan masyarakat. Sementara itu, menurut Uhar Suharsaputra (2013: 299) sumber dana sekolah biasanya diperoleh dari dua sumber, yakni dari pemerintah yang umumnya terdiri dari dana rutin dan biaya operasional (terutama untuk sekolah negeri) dan dana dari masyarakat baik dari orang tua siswa maupun dari kelompok masyarakat lainnya.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 46 Ayat 1 menegaskan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 51 juga menyebutkan bahwa pendanaan pendidikan bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Dana pendidikan yang besumber dari Pemerintah Daerah dapat bersumber dari:

- a. Anggaran pemerintah
- b. Anggaran pemerintah daerah
- c. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat
- d. Sumber lain yang sah

Sementara itu, Tatang M. Amrin, dkk (2010: 92) mengemukakan bahwa sumber-sumber pembiayaan pendidikan di sekolah dikategorikan menjadi lima yaitu:

- a. Anggaran rutin dan APBN (anggaran pembangunan)
- b. Dana Penunjang Pendidikan (DPP)

- c. Bantuan/ sumbangan dari BP3
- d. Sumbangan dari Pemerintah Daerah setempat (kalau ada)
- e. Bantuan lain-lain

Menurut Dedi Supriadi (2003: 5) biaya pendidikan pada tingkat makro (nasional) berasal dari:

- a. Pendapatan negara dari sektor pajak (yang beragam jenisnya)
- b. Pendapatan dari sektor non-pajak
- c. Keuntungan dari ekspor barang dan jasa
- d. Usaha-usaha negara lainnya, termasuk dari divestasi saham pada perusahaan negara (BUMN)
- e. Bantuan dalam bentuk hibah (*grant*) dan pinjaman luar negeri (*loan*) baik dari lembaga-lembaga keuangan internasional (seperti Bank Dunia, ADB, IMF, IDB, JICA) maupun pemerintah baik melalui kerjasama multilateral maupun bilateral.

Dari beberapa uraian pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. Sumber dana pendidikan ada tiga, yaitu pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dana pendidikan yang bersumber dari pemerintah dapat berasal dari pendapatan negara dari sektor pajak, pendapatan dari sektor non-pajak, keuntungan dari ekspor barang dan jasa, dan usaha-usaha negara lainnya. Sedangkan dana pendidikan yang bersumber dari pemerintah daerah dapat berasal dari

anggaran pemerintah, anggaran pemerintah daerah, bantuan pihak asing yang tidak mengikat, dan sumber lain yang sah.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 50 Ayat 1 menyebutkan bahwa sumber pendanaan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Lebih lanjut, dalam pengelolaan dana pendidikan ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan (PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 59) antara lain:

a. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dilakukan dengan memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik atau calon peserta didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan kemampuan atau status sosial-ekonomi.

b. Prinsip Efisiensi

Prinsip efisiensi dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan.

c. Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan sehingga:

- 1) dapat diaudit atas dasar standar audit yang berlaku, dan menghasilkan opini audit wajar tanpa perkecualian; dan

- 2) dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan.

d. Prinsip Akuntabilitas Publik

Prinsip akuntabilitas publik dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Harsono (2008: 89) berpendapat bahwa pengelolaan keuangan sekolah haruslah memenuhi persyaratan responsibel, akuntabel dan transparan. Pengelolaan keuangan sekolah harus bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan penerimaan dana dan pemanfaatan dana serta dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum. Transparan dalam pengelolaan dana berarti dapat diketahui oleh pihak-pihak yang terkait. Lembaga memiliki aturan dimana hanya pihak tertentu saja yang dapat dilibatkan dalam pencaatan administrasi keuangan, mengetahuinya, memahami dan mendalami administrasi keuangan.

5. Dasar Hukum Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan di Indonesia antara lain telah diatur dalam:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen IV)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen IV) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; setiap warga negara wajib mengikuti

pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengatur beberapa pasal yang menjelaskan pembiayaan pendidikan yaitu pada Pasal 11 Ayat 2 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun. Lebih lanjut pada Pasal 12 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Di samping itu disebutkan pula bahwa setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi

peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian pada Bab VIII Wajib Belajar Pasal 34 menyatakan bahwa setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti programwajib belajar; Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada Bab IX Standar Pendidikan Pasal 62 Ayat (1) menyebutkan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Selanjutnya pada Ayat (2) biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Ayat (3) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Ayat (4) Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- 1) gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji;
- 2) bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan;
- 3) biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air,jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

Kemudian pada Ayat (5) Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pasal 51 ayat (1) disebutkan bahwa pendanaan pendidikan bersumber dari Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat. Selanjutnya pada ayat (4) disebutkan bahwa dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dapat bersumber dari: (1) anggaran Pemerintah, (2) bantuan Pemerintah daerah, (3) pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, (4) bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya, (5) bantuan dari pihak asing yang tidak mengikat, dan/atau (6) sumber lain yang sah.

6. Model-model Pembiayaan Pendidikan

Penyaluran biaya pendidikan yang menjadi tanggung jawab negara tentu memerlukan model pembiayaan, agar biaya model tersebut dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk menyelenggarakan program pendidikan. Thomas H. Jones (1978) dalam Uhar Suharsaputra (2013: 291) menyatakan enam model yang dapat dijadikan dasar dalam pengembangan rencana bantuan keuangan pendidikan (sekolah) terdiri dari:

- a. *Flat Grant.* Model bantuan *flat grant* (hibah bagi rata) merupakan kesempatan yg baik bagi sekolah sebab dapat menerima bantuan sebesar pajak yang diperoleh oleh wilayah/ daerah.
- b. *Full State Funding.* *Full state funding* merupakan rencana yang dimungkinkan untuk menghapus semua perbedaan dari masing-masing daerah, baik dalam penggunaan dana maupun perolehannya.
- c. *Foundation Plan.* Model ini menentukan tarif pajak minimum dari tingkat pembelajaran minimal di setiap sekolah pada setiap wilayah. Tiap sekolah diizinkan untuk melewati batas minimal jika diperlukan. *Foundation plan* dirancang untuk menangkali 4 masalah besar dalam keuangan pendidikan yaitu: (1) untuk menyamaratakan pembelanjaan dalam kondisi yang langka dalam sumber daya, (2) sebagai penetapan standarisasi pajak bagi keperluan minimal sekolah, (3) untuk pemisahan wewenang pengaturan sekolah antara pusat dan daerah, (4) untuk menetapkan propinsi dalam perbaikan yang berkesinambungan.

- d. *Guaranteed tax base* (GTB). Model ini adalah model yang mengatur pembagian keuangan bagi dana pendidikan dimana membedakan resentase dana yang diterima. Wilayah yang kurang makmur menerima dana yang lebih banyak dibanding wilayah yang makmur.
- e. *Percentage equalizing*. Model ini menyoroti sisi pengeluaran pendidikan yang harus digunakan, sedangkan GTB menyoroti pemasukannya.
- f. *Power equalizing*. Model ini memerintahkan wilayah yang lebih kaya untuk membayarkan sebagian yang diterima sekolah untuk dikembalikan kepada negara, kemudian diatur untuk diserahkan kepada wilayah yang berpendapatan kurang.

Sementara itu menurut Moch. Idochi Anwar (2013: 231) beberapa model pembiayaan pendidikan antara lain:

- a. Model *Flat Grant (Flat GrantModels)*

Model ini tidak berdasarkan upaya pajak dan kesehatan, tetapi berdasarkan pada jumlah siswa yang harus dididik. Uang bantuan negara dibagikan kepada sekolah di daerah setempat tanpa memperhitungkan berbagai pertimbangan kemampuan pembayaran pajak setempat itu, ada dua perbedaan penting dari model ini, yaitu: (1) beberapa unit kebutuhan pendidikan perlu diberikan kepada siswa dan guru tanpa memperhitungkan berbagai pertimbangan penting dalam tiap-tiap pembayaran program-program dan pelayanan pendidikan yang berbeda, dan (2) jumlah yang berubah-ubah setiap bagian yang diperlukan

menggambarkan perlunya perbedaan-perbedaan di dalam tiap-tiap pembayaran yang dibagikan pada sekolah di daerah-daerah setempat.

b. Model Landasan Perencanaan (*Foundation Plan Models*)

Model ini dimaksudkan agar sekolah lebih baik lagi dengan menempuh beberapa fase, yaitu: (1) eksistensi tingkat layanan pendidikan dan tingkat dukungan sekolah negeri; (2) sekolah memahami pentingnya menambah layanan pendidikan baru di luar minimum; dan (3) agar perencanaan bekerja mengakibatkan tingkat pembelanjaan minimum yang ditetapkan harus dikaitkan setiap tahunnya distrik mengembangkan adaptasi pada program mercusuar. Kebijakan negara menggunakan *foundation plan models* memberi tingkat pendidikan memadai tanpa memberatkan pembayar pajak setempat meski hanya memperoleh jatah minimum.

c. Model Perencanaan Pokok Jaminan Pajak (*Guaranteed Tax Based Plan Models*)

Model Perencanaan Pokok Jaminan Pajak (*Guaranteed Tax Based Plan Models*) di mana angaran pendidikan ditentukan oleh seberapa besar pajak yang akan digunakan untuk pendidikan. Model ini merupakan rencana yang cocok bagi negara membayar jumlah biaya pendidikan atas dasar persentase yang dikehendaki oleh sekolah setempat pada suatu distrik di mana rencana jaminan pajak mempunyai filosofi ekonomi yang sama seperti perencanaan persaatan kemampuan atas dasar persamaan kapasitas yang berhubungan dengan keuangan dan pengeluaran penilaian

per siswa yang mana jaminan negara diperuntukkan bagi wilayah sekolah setempat.

d. Model Persamaan (*Equalization Models*)

Sebagaimana dalam model-model uang bantuan murni ada dua perbedaan penting dalam model-model kesamaan sebagai berikut: (1) dalam menghitung pembayaran program yang sama suatu keseragaman jumlah disetujui setiap siswa, tiap guru atau bagian lain yang dibutuhkan tanpa memberi pertimbangan pada perlunya perbedaan-perbedaan dari tiap-tiap pembayaran program-program dan pelayanan-pelayanan yang berada; dan (2) jumlah yang beubah-ubah tiap bagian yang diperlukan yang memperhitungkan perkembangan berbagai keperluan tiap-tiap pembayaran dari suatu program dasar pemerintah.

e. Model Persamaan Persentase (*Percentage Equalizing*)

Model ini dikembangkan tahun 1920-an merupakan bentuk dasar pembayaran pajak yang sudah tua secara matematis lebih kompleks, PE sama dengan GTB, perbedaannya PE berdasarkan kekayaan/kesejahteraan, upaya pemerolehan hadiah dan sangat inklusif.

f. Model Perencanaan Persamaan Kemampuan (*Power Equalizing Plan*)

Model ini menekankan pada pembelanjaan, namun tujuannya bukan menanyakan pembelanjaan tetapi kekuatan pembelanjaan setiap pajak terhadap semua distrik. Model *Power Equalizing Plan* menggambarkan hasil mutakhir yang menghendaki distrik kaya untuk membayar pajak sekolah yang dikumpulkan kembali pada negara sebagai suatu rencana

membayar sebagian kecil pengeluaran sekolah setempat dalam perbandingan inversi (*inverse*) untuk daerah yang makmur (kaya).

g. Model Pendanaan Negara Sepenuhnya (*Full State Funding Models*)

Model ini merupakan rencana yang dirancang untuk mengeliminasi perbedaan lokal dalam hal pembelanjaan dan perpajakan. Kerangka acuan penting untuk menyongkong konsep pendanaan sepenuhnya dari pemerintah harus dipertimbangkan pertama adalah atas keadilan perlakuan terhadap siswa dan pembayar pajak, pembiayaan pendidikan berdasarkan tingkat kekayaan yang dimiliki sosial, yaitu banyak anak secara keseluruhan pada masyarakat meninggalkan pendidikan yang penting dalam hidupnya, pegangguran, dan masalah kesejahteraan bagi generasi penerusnya. Model ini menentukan tanggung jawab akan kepercayaan pendidikan pada pemerintahan.

h. Model Sumber Pembiayaan (*The Resource Cost Models*)

Model ini menarik, karena percobaan yang rasional untuk mendefinisikan keputusan, ini salah satu cara tujuan mengapa kita memanfaatkan apa yang dilakukan untuk pendidikan. Penanganannya model ini oleh pemerintah, tetapi rupanya mendapatkan kesulitan mencocokkan biaya yang mengambang dari suatu ketentuan apakah pembiayaan itu memadai dan jumlah uang yang tersedia tergantung pada realitas politik yang berkembang pada ditrik tersebut. Model ini menggunakan perbedaan jumlah antara daerah-daerah seperti perbedaan sumber harga,

kelangkaan, kepadatan penduduk, ongkos (biaya) dikaitkan dengan kemiskinan, dan semua kebutuhan pelajaran di daerah itu.

i. Model Surat Bukti/ Penerimaan (*Models Choice and Voucher Plans*)

Model ini membuka kesempatan pada keluarga menentukan model level pendidikan yang mereka kehendaki atau yang sesuai bagi anaknya. Pemerintah dalam merencanakan dana akan menetapkan tanda bukti penerimaan menentukan sejumlah biaya pembelajaran kebutuhan sekolah yang dimungkinkan bagi para orangtua untuk menuripi seluruh ongkos keseluruhan pendidikan anak mereka, pembayaran negara akan bergantung pada usaha dan level pendapatan keluarga.

j. Model Rencana Bobot Siswa (*Weighted Student Plan*)

Model ini menjelaskan bahwa setiap kategori pendidikan akan membutuhkan anggaran sesuai karakteristik dan kompleksitas dari penyelenggara pendidikan tersebut, oleh karena itu tidak mungkin menyamaratakannya.

Dari kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam pembiayaan pendidikan dibagi menjadi beberapa model. Model-model tersebut ditujukan untuk mengelola dana pendidikan agar dipergunakan secara efektif dan efisien.

B. Sekolah Dasar

1. Pengertian Sekolah Dasar

Pendidikan dapat berlangsung di sekolah sebagai institusi pendidikan formal yang diselenggarakan melalui proses belajar mengajar. Barnawi dan Mohammad Arifin (2012: 50) mengungkapkan bahwa pada dasarnya tugas sekolah ialah menyelenggarakan pendidikan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan nilai dan sikap agar peserta didik melewati proses kedewasaannya dan tergali semua potensi yang dimilikinya secara optimal. Pendapat lain dikemukakan oleh Mulyasa (2003: 47) yang mengungkapkan bahwa sekolah tidak hanya bertanggung jawab memberikan berbagai ilmu pengetahuan, tetapi memberi bimbingan dan bantuan terhadap anak-anak bermasalah, baik dalam belajar, emosional, maupun sosial, sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi masing-masing.

Menurut tingkatannya sekolah terbagi menjadi tiga, yaitu sekolah dasar, sekolah lanjutan, dan sekolah tinggi. Peraturan Direktur Jendral Pendidikan Dasar Nomor 144/C/KP/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2015 menyebutkan bahwa sekolah dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

Sementara itu, menurut pendapat Fuad Ihsan (2013: 26) sekolah dasar sebagai satu kesatuan dilaksanakan dalam masa program belajar selama 6

tahun. Jenjang ini merupakan unit terminal yang mempunyai kesinambungan dengan terminal lainnya. Senada dengan pendapat Fuad Ihsan tersebut, Suharjo (2006: 1) menyatakan bahwa sekolah dasar pada dasarnya merupakan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan enam tahun bagi anak-anak usia 6-12 tahun. Berdasarkan pernyataan Fuad Ihsan dan Suharjo dapat disimpulkan bahwa sekolah dasar merupakan jenjang pendidikan yang berlangsung selama enam tahun.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa “jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah jenis pendidikan formal untuk peserta didik usia 7 sampai 18 tahun dan merupakan persyaratan dasar bagi pendidikan yang lebih tinggi”. Jika usia anak pada saat masuk sekolah dasar, merujuk pada definisi pendidikan dasar dalam Undang-Undang tersebut, berarti pengertian sekolah dasar dapat dikatakan sebagai institusi pendidikan yang menyelenggarakan proses pendidikan dasar selama masa enam tahun yang ditujukan bagi anak usia 7-12 tahun.

Suharjo (2006: 8) mengemukakan tujuan pendidikan sekolah dasar sebagai berikut:

- a. Menuntun pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, bakat dan minat siswa.
- b. Memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap dasar yang bermanfaat bagi siswa.
- c. Membentuk warga negara yang baik.
- d. Melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan di SLTP.
- e. Memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap dasar bekerja di masyarakat.
- f. Terampil untuk hidup di masyarakat dan dapat mengembangkan diri sesuai dengan asas pendidikan seumur hidup.

Tujuan pendidikan SD yang dikemukakan oleh Suharjo yaitu bahwa sekolah dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar bagi anak yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat.

2. Pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar

Pembiayaan pendidikan di sekolah dilaksanakan guna membiayai segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan pendidikan yang ada di sekolah. Sekolah Dasar Negeri pada umumnya memiliki sumber-sumber penerimaan yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Menurut Dina Sofianah (2015) untuk Sekolah SD/MI dan SMP/MTs sumber pendanaan umumnya hanya berasal dari satu sumber yaitu berasal dari BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Selain itu, di beberapa Kabupaten/Kota ada pula kebijakan memberikan dana ke sekolah (SMP/MTs dan SD/MI) yang berasal dari APBD II. Penamaan pemberian dana tersebut bermacam-macam ada yang menyebut dana operasional rutin, dana operasional sekolah (DOS), Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan sebagainya.

Petunjuk Teknis (juknis) BOS Tahun 2015 menjelaskan bahwa BOS adalah program pemerintah untuk memberikan pendanaan biaya perasi bagi sekolah sebagai pelaksana program wajib belajar. Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD-SMP, baik negeri maupun swasta yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Sesuai Juknis BOS 2015, dana BOS yang diterima oleh sekolah dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatan-kegiatan berikut.

- a. Pembelian/ penggandaan buku teks pelajaran.
- b. Pembiayaan kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru.
- c. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler peserta didik.
- d. Kegiatan ulangan dan ujian.
- e. Pembelian bahan-bahan habis pakai.
- f. Langganan daya dan jasa.
- g. Perawatan sekolah/ rehab ringan dan sanitasi sekolah.
- h. Pembiayaan honorarium guru honorer dan tenaga honorer.
- i. Pengembangan profesi guru.
- j. Membantu peserta didik miskin.
- k. Pembiayaan pengelolaan BOS.
- l. Pemberian dan perawatan komputer.
- m. Biaya lainnya jika komponen di atas telah terpenuhi.

Petunjuk Tenis Bantuan Operasional Daerah Pendidikan Dasar (BOSDA DIKDAS) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 menyatakan bahwa secara umum program BOSDA DIKDAS bertujuan untuk membantu masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu. Sementara itu, secara khusus program BOSDA DIKDAS bertujuan untuk:

- a. Memenuhi kebutuhan biaya operasional di SD dan SMP negeri dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan.

- b. Meringankan beban biaya operasional di SD/SMP/MI/MTs swasta dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan.

Dana BOSDA DIKDAS Tahun 2015 dapat digunakan untuk:

- a. Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa.
- b. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan berbasis budaya.
- c. Pengembangan kreatifitas unggulan mutu pendidikan,
- d. Kegiatan dalam rangka update data pokok pendidikan (dapodik).
- e. Pengembangan perpustakaan.
- f. Kegiatan ulangan dan ujian.
- g. Pembelian bahan pakai habis.
- h. Langganan daya dan jasa.
- i. Perawatan dan pemeliharaan.
- j. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer.
- k. Pendidikan kebencanaan/ pengurangan resiko bencana di sekolah/ madrasah.
- l. Pembiayaan pengelolaan BOSDA DIKDAS.

C. Kajian Empirik (Penelitian yang Relevan)

Berikut ini beberapa penelitian yang relevan untuk digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Ratih Andini Nitiswara (2015) yang berjudul “Analisis Pembiayaan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Laboratorium Undiksha Singaraja Tahun 2015”.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa sumber pembiayaan pendidikan berasal dari berbagai sumber sebesar Rp 871.602.864,00 alokasinya untuk pengembangan sekolah sebesar Rp 546.307.609,00. Pelaksanaan pembiayaan pendidikan dimulai dari perencanaan dengan acuan Rancangan Pendapatan Anggaran Biaya. Biaya yang tidak sesuai realisasinya dibuat rekapitulasi baru. Pengeluaran paling banyak digunakan untuk kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa sebesar Rp 68.511.330,00. Pengawasan dan pertanggungjawaban dilaksanakan oleh Yayasan Universitas Pendidikan Ganesha, Komite Sekolah, dan Dinas Pendidikan.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama melakukan penelitian mengenai pembiayaan pendidikan, sedangkan perbedaannya ada pada setting penelitian dan pada penelitian yang akan dilakukan tidak membahas mengenai pengawasan dan pertanggungjawaban pembiayaan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ana Fitriana (2011) yang berjudul “Pembiayaan Pendidikan di MA An-Najah Petukangan Selatan Jakarta”.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembiayaan Pendidikan di MA An-Najah Petukangan Selatan Jakarta belum efektif. Dikarenakan dalam langkah-langkah pelaksanaan masih ada beberapa kegiatan yang belum maksimal dilakukan, yaitu dalam perencanaan RAPBS, sumber dana, distribusi, pengawasan, dan evaluasi pembiayaan pendidikan. Seperti; perencanaan dalam pelaksanaan

pembiayaan di sekolah meliputi; keterlibatan guru dan komite dalam penyusunan RAPBS, kurang kreatifnya sekolah dalam pengelolaan sumber dana untuk memperlancar program sekolah, distribusi atau pemakaian terhadap dana pendidikan, meliputi; kurang efektifnya penyaluran terhadap pembiayaan pendidikan, evaluasi terhadap penggunaan dana pendidikan, meliputi; kurangnya keterlibatan pengawas eksternal seperti komite sekolah, agar terciptanya transparansi pembiayaan sekolah.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengenai pembiayaan pendidikan, sedangkan perbedaannya penelitian yang akan dilakukan tidak membahas mengenai langkah-langkah pembiayaan pendidikan tetapi hanya mendeskripsikan pembiayaan pendidikan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Anis (2013) yang berjudul “Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SDIT Assalamah Ungaran”.

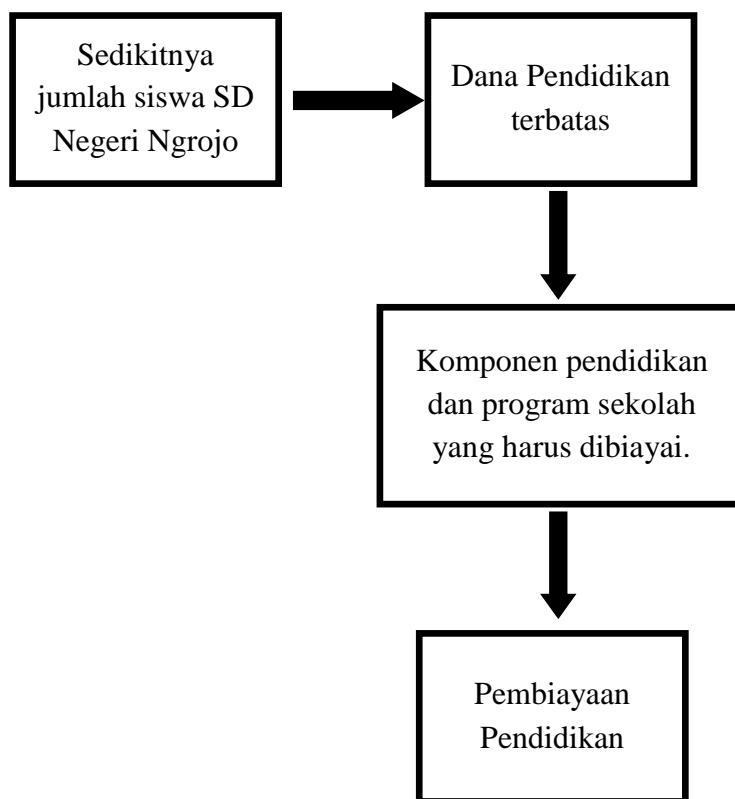
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa manajemen pembiayaan pendidikan di SDIT Assalamah Ungaran dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang ingin dicapai dalam manajemen pembiayaan meskipun ada beberapa faktor penghambat berkenaan dengan alur pencairan dana dan keterlambatan pembayaran iuran SPP, sedangkan untuk faktor pendukung berkenaan dengan tersedianya dana yang selalu memadai dan SDM sekolah yang profesional, sehingga dapat bekerjasama dalam pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan di SDIT Assalamah Ungaran.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengenai pembiayaan pendidikan dan hambatannya, sedangkan perbedaannya penelitian yang akan dilakukan tidak membahas mengenai manajemen pembiayaan pendidikan tetapi hanya mendeskripsikan pembiayaan pendidikan.

D. Kerangka Pikir

SD Negeri Ngrojo merupakan salah satu sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang berada di Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo yang memiliki jumlah peserta didik yang sedikit. Sedikitnya jumlah peserta didik di sekolah tersebut menyebabkan dana pendidikan yang diterima terbatas karena bantuan dana dari pemerintah ditentukan berdasarkan jumlah peserta didik di sekolah. Sementara itu, terdapat komponen-komponen pendidikan yang harus dibiayai dengan dana tersebut, seperti sarana prasarana, tenaga pendidik, kurikulum, pembiayaan, dan peserta didik, serta komponen-komponen lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan. Selain itu, banyak kegiatan yang harus dilaksanakan antara lain: kegiatan intrakurikuler, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan lainnya. Semua kegiatan yang telah diprogramkan tersebut membutuhkan dana dari sekolah untuk membiayai bahan, alat, maupun jasa agar kegiatan dapat terlaksana guna mencapai target mutu yang telah ditetapkan. Sehingga, apabila sekolah mengalami keterbatasan dana dikhawatirkan akan menghambat pencapaian target mutu yang telah ditetapkan. Peneliti mengumpulkan informasi dari sekolah mengenai

pembentukan pendidikan yang ada di SD Negeri Ngrojo. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1.
Kerangka Pikir Penelitian yang berjudul “Pembentukan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Ngrojo Nanggulan Kulon Progo”.

E. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Berapakah jumlah dana pendidikan yang diterima SD Negeri Ngrojo ?
2. Berasal darimana sajakah sumber dana pendidikan di SD Negeri Ngrojo ?
3. Bagaimana dana pendidikan yang diperoleh sekolah dapat membiayai program-program SD Negeri Ngrojo ?

4. Bagaimana sekolah mengatasi permasalahan/ hambatan yang dihadapi dalam pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang berjudul “Pembentukan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Ngrojo Nanggulan Kulon Progo” ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Nurul Zuriah (2006: 47) penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Sedangkan penelitian kualitatif menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2009: 60), adalah suatu pendekatan penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin menggali informasi atau keterangan-keterangan mengenai pembentukan pendidikan yang ada di SD Negeri Ngrojo. Data yang diperoleh dideskripsikan dengan kata-kata dalam bentuk narasi.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Ngrojo yang beralamat di Ngrojo, Kembang, Nanggulan, Kulon Progo. Proses penelitian yang terdiri dari observasi pendahuluan sampai dengan penyusunan hasil penelitian berlangsung dari bulan Oktober 2015 hingga April 2016.

C. Informan Penelitian

Peneliti melakukan pengambilan data melalui informan yang terlibat langsung dalam pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo, sehingga informasi yang diperoleh adalah berasal dari sumber yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Lexy J. Moleong (2005: 97) mendefinisikan informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah dan bendahara sekolah serta 2 guru yang membantu bendahara sekolah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang penting demi keberhasilan penelitian. Pada penelitian kualitatif khususnya dalam hal pengumpulan data memiliki teknik khusus yang digunakan. Pada setiap teknik tersebut masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan sehingga dalam pengumpulan data harus memilih teknik yang benar-benar tepat dan sesuai dengan jenis permasalahan penelitian yang akan dipecahkan. Menurut Poham (2007) dalam Andi Prastowo (2012: 208), teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang telah ditetapkan guna mendapatkan data-data dan informasi yang akurat dan dapat

dipertanggungjawabkan kebenarannya. Menurut Deddy Mulyana (2013: 180) wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Peneliti melakukan wawancara dengan kepala sekolah dan bendahara sekolah serta 2 orang guru yang membantu bendahara sekolah untuk memperoleh data mengenai pemberian pendidikan yang ada di SD Negeri Ngrojo.

2. Observasi

Selain menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan teknik observasi atau pengamatan. Nana Syaodih Sukmadinata (2006: 220) berpendapat bahwa observasi (*observation*) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.

Peneliti melakukan observasi langsung di SD Negeri Ngrojo untuk mendapatkan informasi mengenai sarana dan prasarana pendidikan seperti bangunan, lahan, ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium IPA, ruang pimpinan, ruang guru, tempat beribadah, ruang UKS, jamban, gudang, ruang sirkulasi, dan tempat bermain/ berolahraga yang terdapat di SD Negeri Ngrojo. Observasi ini diperlukan karena sarana dan prasarana pendidikan menjadi salah satu komponen yang dibiayai. Agar mempermudah pengamatan dalam penelitian ini menggunakan alat bantu kamera untuk merekam gambar.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh atau menghimpun dokumen-dokumen atau data-data fisik tentang pembiayaan pendidikan yang ada di SD Negeri Ngrojo. Alasan digunakannya teknik dokumentasi ini adalah untuk bukti penguatan dari keterangan-keterangan yang diperoleh dalam wawancara dan observasi mengenai pembiayaan pendidikan di sekolah tersebut. Dokumen yang dijadikan sumber antara lain berupa profil sekolah, visi dan misi sekolah, data jumlah peserta didik Tahun Ajaran 2015/2016, data pendidik dan tenaga kependidikan di SD Negeri Ngrojo, fasilitas sekolah, dan RKAS Tahun Ajaran 2015/2016.

E. Instrumen Penelitian

Penggunaan teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian didukung dengan adanya instrumen penelitian, sebagai alat atau perangkat untuk membantu dan memperlancar dalam mengumpulkan data menjadi lebih sistematis. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri atau *human instrument*. Seperti yang diungkapkan Djunaidi Ghony & Fauzan Almansyur (2012: 95) yang menjelaskan bahwa *human instrument* dalam penelitian kualitatif dipahami sebagai alat yang dapat mengungkap fakta-fakta lokasi peneliti. Tidak ada alat yang elastis dan tepat untuk mengungkap data kualitatif kecuali peneliti itu sendiri. Dalam penelitian kualitatif, peneliti lah yang menjadi instrumen utama yang terjun ke lapangan

serta berusaha sendiri mengumpulkan informasi melalui pengamatan atau wawancara (Andi Prastowo, 2012: 209).

Dalam penelitian yang menggunakan peneliti sendiri sebagai instrumennya seperti yang diungkapkan oleh beberapa pendapat di atas, peneliti juga membutuhkan beberapa kisi-kisi pedoman untuk membantu peneliti dalam memperoleh data. Adapun kisi-kisi instrumen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Kisi-kisi Pedoman Wawancara

Sumber data	Data	Aspek
Kepala Sekolah, dan Bendahara Sekolah	1. Pembiayaan Pendidikan 2. Hambatan dalam Pembiayaan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Berasal darimana sajakah sumber dana pendidikan di SD Negeri Ngrojo? - Berapakah jumlah dana pendidikan yang diterima SD Negeri Ngrojo? - Program apa saja yang harus dibiayai oleh SD Negeri Ngrojo? - Berapakah jumlah biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh SD Negeri Ngrojo? - Apa sajakah hambatan dalam pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo? - Bagaimana upaya sekolah dalam mengatasi hambatan yang ada dalam pembiayaan pendidikan? - Bagaimana peran Komite Sekolah dalam pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo? - Apa harapan sekolah terkait pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo?

Tabel 2. Kisi-kisi Pedoman Observasi

Sumber Data	Aspek
Artefak Fisik di SD Negeri Ngrojo	<p>Keadaan Sarana dan Prasarana, yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lahan 2. Bangunan 3. Ruang Kelas 4. Ruang Perpustakaan 5. Laboratorium IPA 6. Ruang Pimpinan 7. Ruang Guru 8. Tempat Beribadah 9. Ruang UKS 10. Jamban 11. Gudang 12. Ruang Sirkulasi 13. Tempat Bermain/Berolahraga.

Tabel 3. Kisi-kisi Pedoman Dokumentasi

Sumber Data	Jenis Data	Aspek
Dokumen tertulis dan foto-foto mengenai SD Negeri Ngrojo	Profil Sekolah	<ol style="list-style-type: none"> a. Profil Sekolah b. Visi, misi, dan tujuan sekolah c. Struktur Organisasi d. Keadaan Peserta Didik e. Keadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	Pembentukan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> a. RKAS b. Dokumen-dokumen terkait pembentukan

F. Keabsahan Data

Keabsahan data sangat penting dalam sebuah penelitian, hal ini karena keabsahan data merupakan salah satu langkah awal dari analisis data. Agar data yang diperoleh sesuai dengan keadaan di lapangan yang sebenarnya, maka diperlukan uji keabsahan data. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam

penelitian ini yaitu dengan triangulasi. Nusa Putera (2012: 189) menjelaskan triangulasi sebagai berikut:

Dalam bahasa sehari-hari triangulasi dikenal dengan istilah cek dan ricek yaitu pengecekan data menggunakan beragam sumber, teknik, dan waktu. Beragam sumber maksud digunakan lebih dari satu sumber untuk memastikan apakah datanya benar atau tidak. Beragam teknik berarti penggunaan berbagai cara secara bergantian untuk memastikan apakah datanya memang benar. Cara yang dilakukan adalah wawancara, pengamatan, dan analisis dokumen. Beragam waktu berarti memeriksa keterangan dari sumber yang sama pada waktu berbeda pagi, siang, sore, atau malam. Juga berarti membandingkan penjelasan sumber ketika ia diajak ngobrol berdua dengan peneliti dan saat ia berbicara di depan publik tentang topik yang sama.

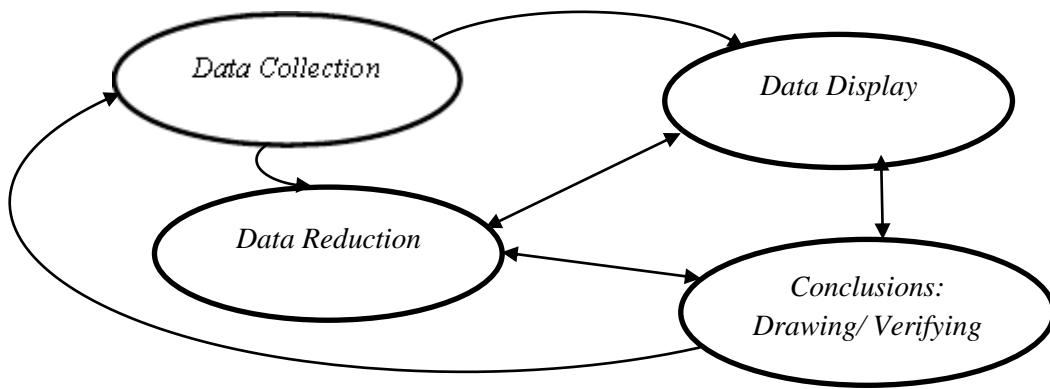
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik adalah menguji keabsahan data dengan mengecek data yang diperoleh dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan data permasalahan yang sama yaitu tentang pemberian pendidikan. Sementara itu, triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi sumber yang digunakan dalam penelitian ini antara lain kepala sekolah dan bendahara sekolah serta 2 orang guru yang membantu bendahara sekolah.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen (1982) dalam Lexy J. Moleong (2014: 248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang

dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain. Sementara itu, menurut Jhonatan Sarwono (2006: 239), prinsip pokok analisis kualitatif adalah mengolah dan menganalisis data-data yang sistematik, teratur, terstruktur dan mempunyai makna. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013: 247) dalam proses analisis data kualitatif, terdapat beberapa komponen diantaranya sebagai berikut.

1. *Data reduction* (reduksi data), mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
2. *Data display* (penyajian data), penyajian data dalam penelitian kualitatif berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.
3. *Conclusion drawing/verifikasi*, kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.



Gambar 2. Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman (Sugiyono, 2013: 247)

Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengacu pada konsep Miles dan Huberman yaitu *interactive model*. Berdasarkan komponen dalam analisis data tersebut, maka dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan diantaranya yaitu:

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan di lapangan untuk mengetahui data mengenai dana pendidikan dan pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo menggunakan berbagai sumber dan teknik yakni dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Berdasarkan data yang telah terkumpul maka peneliti melakukan reduksi data karena data yang diperoleh sangat banyak maka peneliti harus mereduksi yakni merangkum dan memilih hal-hal pokok dari data-data yang telah diperoleh, serta mengorganisasikan data agar dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi. Tujuan reduksi data adalah untuk memilah data secara

teliti, sehingga data yang diperoleh dapat menggambarkan secara jelas keadaan yang ada di lapangan.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Kegiatan selanjutnya yang dilaksanakan setelah mereduksi data adalah melakukan penyajian data. Dalam penelitian ini data disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif, sehingga dengan penyajian data ini akan diperoleh kejelasan dan akan mempermudah untuk menganalisis hal-hal yang sedang diteliti.

4. *Conclusions Drawing/ Verifying* (penarikan kesimpulan)

Setelah data disajikan, dalam penelitian ini akan ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh merupakan ringkasan dari hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Sebelum peneliti menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan, peneliti akan memaparkan deskripsi lokasi penelitian. Deskripsi lokasi penelitian ini ditujukan untuk memaparkan SD Negeri Ngrojo yang merupakan tempat penelitian dilaksanakan. Pemaparan deskripsi lokasi penelitian ini ditujukan untuk mengetahui gambaran umum lokasi penelitian. Adapun hal-hal yang akan dipaparkan terdiri dari: (1) profil sekolah, (2) visi dan misi sekolah, (3) keadaan peserta didik Tahun Ajaran 2015/2016, (4) keadaan tenaga pendidik dan kependidikan, (5) keadaan sarana dan prasarana sekolah, dan (6) struktur organisasi sekolah

1. Profil Sekolah

- a. Nama Sekolah : SD Negeri Ngrojo
- b. Nomor Statistik Sekolah : 101040409029
- c. Propinsi : D.I. Yogyakarta
- d. Otonomi Daerah : Kulon Progo
- e. Kecamatan : Nanggulan
- f. Desa/Kelurahan : Kembang
- g. Jalan dan Nomor : Ngrojo
- h. Kode Pos : 55671
- i. Telepon : -
- j. Daerah : Pedesaan

- k. Status Sekolah : Negeri
- l. Kelompok : Imbas
- m. Akreditasi : B
- n. Tahun Berdiri : 1982
- o. Kegiatan Belajar : Pagi
- p. Bangunan Sekolah : Milik Sendiri
- q. Lokasi Sekolah : Ngrojo, Kembang
- r. Jarak Ke Pusat Kecamatan : 3 Km
- s. Jarak Ke Pusat Kota Otoda : 18 Km
- t. Terletak Pada Lintasan : Desa
- u. Jumlah Anggota Gugus : 7 Sekolah
- v. Organisasi Penyelenggara : Pemerintah

SD Negeri Ngrojo merupakan salah satu sekolah dasar di Kabupaten Kulon Progo yang berdiri pada tahun 1982 dengan menempati areal tanah seluas 1500 m². SD Negeri Ngrojo terletak di wilayah Pedukuhan Ngemplak dan Pedukuhan Ngrojo Desa Kembang Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo. Sekolah inistrategis karena letaknya di pinggir jalan raya menuju Yogyakarta sehingga mudah untuk menemukan alamat SD tersebut.

2. Visi dan Misi Sekolah

Setiap sekolah pastilah memiliki visi dan misi yang digunakan sebagai pedoman dalam mewujudkan tujuan sekolah masing-masing. Visi dari Sekolah Dasar Negeri Ngrojo adalah “Unggul dalam Prestasi, Seni,

Terampil, Berbudaya Tinggi Berdasarkan Iman dan Taqwa". Sedangkan Misi dari SD Negeri Ngrojo adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pembelajaran dan bimbingan yang intensif untuk mencapai tingkat ketuntasan dan daya serap tinggi
- b. Menumbuh kembangkan berbagai kesenian sehingga mampu berkreasi
- c. Menumbuh kembangkan keterampilan sehingga mampu berkarya
- d. Meningkatkan semangat kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sekolah
- e. Meningkatkan jumlah siswa demi kelestarian sekolah
- f. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran agama yang dianut sehingga tercipta sekolah yang kondusif.

3. Keadaan Peserta Didik Tahun Ajaran 2015/2016

Peserta didik merupakan komponen utama terselenggaranya kegiatan belajar mengajar. Tanpa peserta didik, proses pembelajaran di sekolah tidak akan terlaksana. Jumlah peserta didik di SD Negeri Ngrojo tahun ajaran 2015/2016 berjumlah 34 orang yang terdiri dari 16 laki-laki dan 18 perempuan. Secara keseluruhan, jumlah peserta didik di SD Negeri Ngrojo tahun ajaran 2015/2016 tergolong sedikit untuk satu sekolah. Kelas I hanya berjumlah 2 orang peserta didik yang terdiri dari 1 laki-laki dan 1 perempuan. Pada kelas II berjumlah 4 peserta didik yang terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan, kemudian pada kelas III berjumlah 6 peserta didik yang terdiri dari 4 laki-laki dan 2 perempuan. Sementara itu, pada kelas IV berjumlah 6 peserta didik yang terdiri dari 3 laki-laki dan 2 perempuan,

sebenarnya peserta didik laki-laki terdapat 4 orang namun karena suatu hal membuat satu orang pindah sekolah. Jumlah peserta didik kelas V yaitu 6 orang yang terdiri dari 2 laki-laki dan 4 perempuan serta jumlah peserta didik yang paling banyak di sekolah tersebut yaitu pada kelas VI berjumlah 11 peserta didik yang terdiri dari 6 laki-laki dan 5 perempuan. Keseluruhan peserta didik yang berjumlah 34 orang menempati 6 kelas yang mengikuti proses belajar mengajar di SD Negeri Ngrojo dengan setiap kelasnya rata-rata berisikan 6 orang peserta didik. Keadaan peserta didik yang demikian mengakibatkan kelangsungan belajar mengajar di sekolah tersebut menjadi kurang efektif.

4. Keadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik merupakan salah satu komponen yang penting dalam menunjang kelancaran proses belajar mengajar di sekolah, sedangkan tenaga kependidikan bertugas menunjang penyelenggaraan pendidikan di sekolah. SD Negeri Ngrojo tahun 2015/2016 memiliki 11 orang pendidik dan tenaga kependidikan yang terdiri dari kepala sekolah yang berjenis kelamin laki-laki sudah menempuh sarjana, guru PNS yang berjumlah 8 orang, guru honorer 1 orang dan penjaga sekolah 1 orang. Guru di SD Negeri Ngrojo terdiri dari berbagai macam lulusan. Guru mata pelajaran pendidikan agama islam merupakan lulusan D.II, begitu pula dengan guru mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan yang juga merupakan lulusan D.II. Beberapa guru kelas merupakan lulusan S.1 dan terdapat pula guru kelas lulusan SPG dan lulusan SLTA (sekarang SMA). Guru honorer merupakan

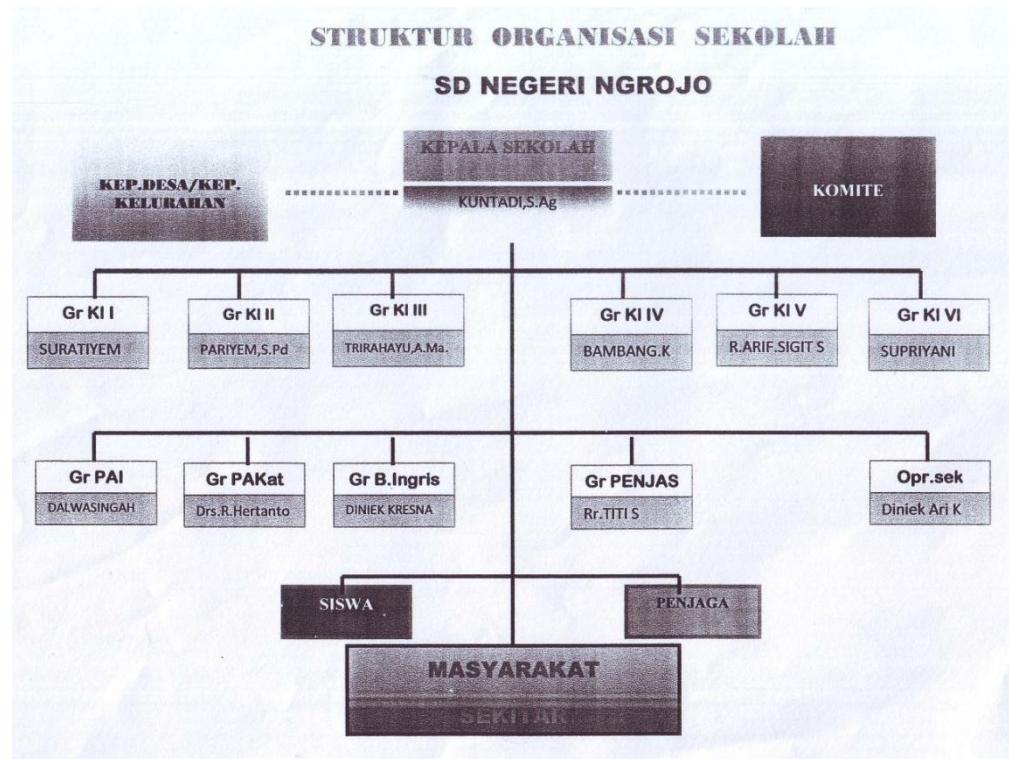
lulusan S.1 dan penjaga sekolah berjenis kelamin laki-laki yang merupakan lulusan SLTA. Setiap pendidik dan tenaga kependidikan telah memiliki tugasnya masing-masing.

5. Keadaan Sarana dan Prasarana Sekolah

Sarana dan prasarana sekolah merupakan salah satu komponen yang menunjang keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai akan memperlancar kegiatan belajar mengajar, sebaliknya sarana dan prasarana yang tidak memadai akan menghambat keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. SD Negeri Ngrojo menempati areal tanah seluas 1500 m². Sekolah memberikan sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar dan kegiatan sekolah lainnya. Sarana dan prasarana tersebut berupa ruang tamu, ruang kepala sekolah, ruang kantor guru, ruang kelas yang berjumlah 6kelas, ruang perpustakaan, mushola, koperasi sekolah, UKS, gudang, toilet, dan tempat sepeda. Beberapa sarana dan prasarana yang ada di SD Negeri Ngrojo keadaannya kurang baik dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah.

6. Struktur Organisasi Sekolah

Adapun struktur organisasi Sekolah Dasar Negeri Ngrojo sebagai berikut.



Gambar 3.
Struktur Organisasi SD Negeri Ngrojo

Berdasarkan struktur organisasi di atas maka masing-masing jabatan telah memiliki tugas masing-masing sehingga berguna dalam melancarkan pelaksanaan kegiatan di sekolah.

B. Hasil Penelitian

1. Pembiayaan Pendidikan di SD Negeri Ngrojo Tahun Ajaran 2015/2016

Setiap kegiatan yang dilakukan sekolah, baik negeri maupun swasta membutuhkan dana baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Dana

pendidikan merupakan sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan pendidikan. Besarnya dana yang diterima sekolah bergantung pada sumber dana. Sumber dana pendidikan merupakan pihak-pihak yang memberikan bantuan subsidi dan sumbangan kepada lembaga pendidikan. Dana pendidikan di SD Negeri Ngrojo berasal dari tiga sumber. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak K selaku Kepala SD Negeri Ngrojo sebagai berikut.

“Pertama, itu kalau yang namanya sekolah itu ada tiga sumber. Satu yang namanya itu BOS Pusat/ BOS reguler, yang kedua itu dari Provinsi, tingkat provinsi yang dinamakan BOSDA, kemudian sumber dana yang ketiga itu dari tingkat II/ Kabupaten itu namanya PBPSD. Jadi tiga sumber itu setiap sekolah itu yang negeri pasti dapat, Mbak”. (Hasil Wawancara, Hari Jum’at 29 Januari 2016)

Dari kutipan wawancara dengan Bapak K dapat diketahui bahwa sumber dana pendidikan di SD Negeri Ngrojo berasal dari BOS Pusat/reguler, BOS Provinsi/BOSDA, dan BOS Kabupaten/PBPSD. Hasil wawancara tersebut didukung dengan hasil studi dokumentasi yaitu dalam RKAS menyebutkan bahwa dana pendidikan di SD Negeri Ngrojo berasal dari BOS Pusat, BOS Provinsi, dan BOS Kabupaten.

Senada dengan pernyataan Bapak K dan hasil studi dokumen, Ibu S selaku guru yang membantu bendahara sekolah juga memberikan pernyataan berikut ini. “Sumber dana pendidikan disini berasal dari tiga sumber Mbak yaitu BOS Pusat, BOS Provinsi, dan BOS Kabupaten”. (Hasil Wawancara, Hari Jum’at 29 Januari 2016)

Pernyataan yang dikemukakan oleh Ibu S tersebut juga didukung oleh Bapak BK selaku Bendahara Sekolah. “Sumber dananya dari BOS, Mbak.

Kan BOS ada 3, BOS Reguler, BOSDA, BOS Kabupaten”. (Hasil Wawancara, Hari Kamis 27 Januari 2016)

Bapak AS selaku guru yang membantu bendahara sekolah juga menyatakan hal yang sama mengenai sumber dana pendidikan yang ada di SD Negeri Ngrojo. “Sumbernya dari BOS Pusat/ BOS Reguler, kemudian BOSDA dari Provinsi, dan BOS Kabupaten”. (Hasil Wawancara, Hari Kamis 4 Februari 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumen yang dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa sumber dana pendidikan SD Negeri Ngrojo, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ BOS Pusat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD Provinsi)/ BOSDA, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBD Kabupaten)/ BOS Kabupaten. Wawancara dan dokumentasi tersebut membuktikan bahwa sekolah negeri tidak diperkenankan melakukan pungutan apapun terkait pemenuhan kebutuhan operasional sekolah, sehingga sekolah hanya menerima dana dari pemerintah. Dengan demikian, Dana BOS merupakan sumber dana utama ditambah dengan BOS dari pemerintah daerah, sehingga seluruh kegiatan yang ada dalam RKAS itu dibiayai dengan menggunakan dana BOS.

Jumlah dana pendidikan yang diterima SD Negeri Ngrojo pada tahun ajaran 2015/2016 sebesar Rp 40.180.000,00. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak K selaku Kepala SD Negeri Ngrojo.

“Untuk tahun ajaran ini dananya berjumlah Rp 40.180.000,00. Dari BOS Reguler Rp 27.800.000,00. Kemudian BOSDA itu jumlahnya Rp

4.480.000,00. Sementara kalau BOS Kabupaten itu jumlahnya sudah ditentukan dari Dinas Pendidikan, Mbak". (Hasil Wawancara, Hari Jum'at 29 Januari 2016)

Berdasarkan kutipan wawancara dengan Kepala Sekolah tersebut dapat diketahui bahwa jumlah dana pendidikan yang diterima SD Negeri Ngrojo berjumlah Rp 40.180.000,00.

Berikut ini Ibu S selaku guru yang membantu bendahara sekolah menambahkan pernyataan dari Bapak K. "Untuk tahun 2015 ini dana yang diterima dari BOS Kabupaten itu sebesar Rp 8.140.000,00". (Hasil Wawancara, Hari Jum'at 29 Januari 2016)

Pernyataan lain juga dikemukakan oleh Bapak BK selaku Bendahara Sekolah. "Karena muridnya sedikit makanya ya sedikit. Kalau dari BOS Reguler itu hanya 27juta-an, kalau dari BOSDA itu Rp 4.480.000,00". (Hasil Wawancara, Hari Rabu 27 Januari 2016)

Sementara itu, berdasarkan pernyataan dari Bapak AS selaku guru yang membantu bendahara sekolah menyebutkan bahwa untuk BOS Pusat sebesar Rp 27.200.000,00 dan BOSDA Rp 4.840.000,00. "Jumlah dana, untuk BOSDA Provinsi itu total kita dapat selama satu tahun kita dapat Rp 4.840.000,00 untuk BOS Reg itu Rp 27.200.000,00 kalau untuk yang BOS Kabupaten itu sama Ibu S". (Hasil Wawancara, Hari Kamis 4 Februari 2016)

Dari beberapa pernyataan dalam kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah dana pendidikan yang diterima SD Negeri Ngrojo sebesar Rp 40.180.000,00 yang berasal dari BOS Pusat sebesar Rp

27.200.000,00; BOS Provinsi sebesar Rp 4.840.000,00; dan BOS Kabupaten adalah sebesar Rp 8.140.000,00.

Hasil wawancara tersebut didukung dengan hasil studi dokumen yang dilakukan oleh peneliti yaitu bahwa dalam dokumen RKAS memang tercantum bahwa jumlah dana pendidikan yang diterima SD Negeri Ngrojo tahun ajaran 2015/2016 adalah sebesar Rp 40.180.000,00 yang berasal dari BOS Pusat sebesar Rp 27.200.000,00; BOS Provinsi sebesar Rp 4.840.000,00; dan BOS Kabupaten adalah sebesar Rp 8.140.000,00.

Pembiayaan yang ada di sekolah digunakan untuk melaksanakan program-program demi meningkatkan mutu sekolah. Sesuai dengan JUKNIS Penggunaan Dana BOS, maka Kepala Sekolah mengimplementasikannya ke dalam berbagai program kegiatan sekolah yang memuat pada delapan Standar Nasional Pendidikan. Bapak K selaku Kepala Sekolah mengungkapkan bahwa program yang dibiayai oleh SD Negeri Ngrojo berdasarkan Standar Nasional Pendidikan. “Programnya banyak sekali, ada di RKAS. Penggunaan dana berdasarkan SKL, Standar Isi, Standar Proses, PTK, Sarpras, Pengelolaan, Pembiayaan, dan Pendidikan. Jadi uang itu digunakan untuk delapan standar itu”. (Hasil Wawancara, Hari Jum’at 29 Januari 2016)

Pernyataan dari Bapak K tersebut senada dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak AS selaku guru yang membantu bendahara sekolah.

“Kalau dari panduan juknis ya itu kita pakai 8 standar, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidik

dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan, dan Standar Penilaian Pendidikan, hanya itu”. (Hasil Wawancara, Hari Kamis 4 Februari 2016)

Sementara itu pernyataan dari Bapak BK selaku Bendahara Sekolah adalah sebagai berikut. “Kalau dulu ya macam-macam ada untuk kerusakan sekolah, seperti genting bocor, pintu rusak”. (Hasil Wawancara, Hari Rabu 27 Januari 2016)

Pernyataan lain juga dikemukakan oleh Ibu S selaku guru yang membantu bendahara sekolah mengenai program yang harus dibiayai. “Ada bahan bangunan, upah tukang, ATK, Listrik, Pembersih, honor pengelola, Penggandaan soal-soal UTS maupun Semesteran, dan masih banyak lagi nanti lihat di laporan”. (Hasil Wawancara, Hari Jum’at 29 Januari 2016)

Dari beberapa kutipan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa program sekolah yang harus dibiayai oleh SD Negeri Ngrojo berdasarkan 8 standar, yaitu Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan, dan Standar Penilaian Pendidikan. Namun, dalam dokumen RKAS program-program yang harus dibiayai diantaranya yaitu Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan, dan Standar Penilaian Pendidikan kecuali Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

SD Negeri Ngrojo menggunakan dana salah satunya untuk membeli dan membiayai perawatan sarana dan prasarana yang menunjang proses

pembelajaran, sehingga sekolah memiliki beberapa sarana prasarana yang cukup memadai. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, ruang kelas yang ada berjumlah enam ruang. Beberapa ruang terdapat bangku siswa, meja guru, papan tulis, dan lemari. Akan tetapi beberapa ruang kelas yang lain keadaannya kurang begitu baik. Sedangkan untuk ruang perpustakaan di SD Negeri Ngrojo ini memang ada, namun keadaannya kurang baik dan hanya digunakan untuk menyimpan buku-buku maupun benda-benda yang sudah tidak terpakai. Sementara itu, untuk ruang UKS memang belum ada, tetapi ada ruang peraga yang di dalamnya terdapat ranjang dan dimaksudkan untuk UKS.

Operasional sekolah dilaksanakan menggunakan dana pendidikan. Pengeluaran yang dipergunakan tersebut merupakan biaya pendidikan. Berikut pernyataan dari Bapak K selaku Kepala Sekolah terkait dengan jumlah biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh SD Negeri Ngrojo. “Kalau untuk jumlah uangnya banyak sekali, nanti lihat saja ada di laporan”. (Hasil Wawancara, Hari Jum’at 29 Januari 2016)

Pernyataan lain dari ibu S selaku guru yang membantu bendahara sekolah. “Dari yang BOS Kabupaten hanya Rp 8.138.500 karena tidak bisa dicairkan semua yang untuk upah tukang yaitu sebesar Rp 1.250,00 dari jumlah seharusnya Rp 8.140.000,00.” (Hasil Wawancara, Hari Jum’at 29 Januari 2016)

Sementara itu, pernyataan dari Bapak BK selaku Bendahara Sekolah berikut ini. “Kalau untuk jumlahnya ada di laporan”. (Hasil Wawancara, Hari Rabu 27 Januari 2016)

Bapak AS selaku guru yang membantu bendahara sekolah juga mengungkapkan hal senada. “Kalau untuk jumlahnya ada banyak sekali, Mbak. Kita berusaha antara rencana, pelaksanaan dan laporannya itu dibuat sama”. (Hasil Wawancara, Hari Kamis 4 Februari 2016)

Dari beberapa pernyataan dalam kutipan wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh SD Negeri Ngrojo jumlahnya dibuat hampir sama antara rencana dan pelaksanaannya. Hal tersebut berarti mengindikasikan bahwa sekolah hanya melakukan pembukuan bayangan, artinya yang tertulis dalam dokumen tidak sama dengan yang sebenarnya terjadi.

2. Hambatan yang Dihadapi dalam Pembiayaan Pendidikan di SD Negeri Ngrojo Tahun Ajaran 2015/2016

Pelaksanaan pembiayaan pendidikan tidak selalu berjalan dengan lancar dan sesuai harapan. Kadangkala ada hambatan/kendala yang tidak dapat dihindari. Namun se bisa mungkin seluruh pihak, baik kepala sekolah, bendahara, guru, komite sekolah dan orang tua siswa bekerja sama dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di SD Negeri Ngrojo. Hambatan yang ada dalam pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo dapat diketahui dari pernyataan Ibu S selaku guru yang membantu bendahara sekolah dalam kutipan wawancara berikut ini.

“Hambatannya ya karena sekolah tidak dapat melakukan pungutan terhadap orang tua, sementara dana yang dimiliki sekolahnya dari pemerintah dan terbatas, sehingga menyebabkan kesulitan dalam pengembangan program sekolah, seperti ekstrakurikuler”. (Hasil Wawancara, Hari Jum’at 29 Januari 2016)

Dari pendapat yang dikemukakan ibu S dalam kutipan wawancara di atas didapat pernyataan bahwa hambatan dalam pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo ini adalah sekolahtidak dapat melakukan pungutan terhadap orang tua siswa. Pernyataan lain diungkapkan oleh Bapak AS selaku guru yang membantu bendahara sekolah.

“Kalau untuk pembiayaan siswanya sendiri tidak masalah, karena memang sudah dianggarkan sesuai jumlah siswa. Kalau kegiatan yang di luar sekolah itu yang kendala. Selain itu, kegiatan yang bukan berkaitan dengan siswa. Kalau dikaitkan dengan operasional sekolah ya memang bermasalah, jelas jumlah siswanya sedikit ya seperti itu, kekurangan dana”. (Hasil Wawancara, Hari Kamis 4 Februari 2016)

Dari pendapat yang dikemukakan bapak AS dalam kutipan wawancara di atas didapat pernyataan bahwa hambatan dalam pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo ini adalah operasional sekolah yang harus dibiayai dengan dana yang terbatas. Senada dengan pernyataan yang diungkapkan bapak AS tersebut, Bapak K selaku Kepala Sekolah mengungkapkan bahwa hambatannya yaitu banyaknya kegiatan selain kegiatan belajar yang harus dibiayai dengan dana yang terbatasi sekolah.

“Hambatan dalam pembiayaan itu ya banyak program yang harus dibiayai dan bermacam-macam. Kalau dalam kegiatan belajar mengajar itu ya berjalan lancar biasa, tapi kalau untuk kegiatan yang di luar seperti untuk kegiatan 17an itu dananya tidak cukup”. (Hasil Wawancara, Hari Jum’at 29 Januari 2016)

Pernyataan lainnya juga dikemukakan oleh Bapak BK selaku Bendahara Sekolah. “Hambatan dalam pembiayaan pendidikan ya karena

dananya sedikit maka tidak bisa membiayai kebutuhan yang mendadak”.

(Hasil Wawancara, Hari Rabu 27 Januari 2016)

Dari beberapa kutipan pernyataan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo ini adalah sekolah tidak dapat melakukan pungutan, di sisi lain dana yang dimiliki hanya terbatas sehingga menyebabkan kesulitan dalam pengembangan program sekolah serta banyaknya program yang harus dibiayai dengan dana yang dimiliki sekolah.

Sekolah tentunya memiliki upaya tersendiri dalam menghadapi kendala/ hambatan yang muncul dalam pembiayaan pendidikan. Berikut ini pernyataan mengenai upaya sekolah dalam mengatasi hambatan dalam pembiayaan pendidikan yang dikemukakan oleh Bapak K selaku Kepala Sekolah. “Sementara ini ya berusaha mencari dana untuk tambahan. Terkadang menggunakan uang pribadi guru dan iuran guru-guru. Kalau dari guru misal ada kegiatan, guru bawa konsumsi”. (Hasil Wawancara, Hari Jum’at 29 Januari 2016)

Senada dengan pernyataan Bapak K tersebut, Bapak BK selaku bendahara sekolah juga mengungkapkan hal yang serupa. “Ya kira-kira kita itu ya diminimalisir program-programnya, ya harus dicukup-cukupkan agar program tetap berjalan”. (Hasil Wawancara, Hari Rabu 27 Januari 2016)

Sementara itu, ibu S selaku guru yang membantu bendahara sekolah mengungkapkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan yang dianggap penting terlebih dahulu.

“Dalam melaksanakan kegiatan ya yang tidak begitu penting ya tidak dikerjakan, Mbak. Mana yang lebih penting itu yang didahulukan. Selain itu misalnya untuk pembuatan RPP saja ya memakai uang pribadi guru. Mungkin kalau di sekolah lain nanti bisa dimintakan ganti, kalau sini tidak bisa mbak, tidak mampu”. (Hasil Wawancara, Hari Jum’at 29 Januari 2016)

Pernyataan lain dikemukakan oleh Bapak AS selaku guru yang membantu bendahara sekolah sebagai berikut.

“Kalau usaha di luar penggalian dana itu nggak mungkin. Ya usaha kita mengoptimalkan apa yang kita punya. Misal, kalau memang dengan BOS Reg itu nggak cukup kita tambah BOSDA, BOSDA kurang cukup pakai BOS Kabupaten. Kalau sekolah negeri itu sulit untuk penggalian dana selain dari ketiga sumber tadi, kalau swasta saya yakin bisa”. (Hasil Wawancara, Hari Kamis 4 Februari 2016)

Dari kutipan wawancara tersebut menurut pendapat Bapak AS selaku guru yang membantu bendahara sekolah, upaya dalam mengatasi hambatan yang ada dalam pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo ini yaitu dengan berusaha mengoptimalkan sumber yang ada.

Berdasarkan beberapa kutipan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan sekolah dalam mengatasi hambatan yang ada yaitu dengan berusaha meminimalisir pengeluaran dana dan mendahulukan program yang lebih penting serta berusaha mengoptimalkan sumber daya yang ada. Secara program digunakan RKAS, namun sebagai pedoman operasional yang konkret berdasarkan jumlah uang yang ada dan dibuat skala prioritas. Apabila pada tahun ajaran yang berjalan pemenuhan kebutuhan yang diprioritaskan tidak mencukupi maka kebutuhan itu akan menjadi prioritas pada tahun ajaran berikutnya. Meskipun dalam pelaporannya, seperti tahun-tahun sebelumnya antara rencana, pelaksanaan dan laporan kegiatan dan belanja sekolah dibuat sama.

Partisipasi dari semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah, baik kepala sekolah, guru, siswa dan lainnya seperti orang tua siswa atau masyarakat sangat diperlukan agar setiap kebijakan dan keputusan sekolah benar-benar mencerminkan aspirasi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Komite sekolah merupakan wadah bagi stakeholders untuk berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam kerangka pengembangan pendidikan. Komite memiliki peran dalam pembiayaan pendidikan di sekolah. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak K selaku Kepala Sekolah. “Peran komite dalam pembiayaan ya memberi masukan, mengarahkan, dan mengawasisepterti dalam penyusunan RKAS, Mbak”.(Hasil Wawancara, Hari Jum’at 29 Januari 2016)

Sementara itu, Bapak BK selaku Bendahara Sekolah menyatakan bahwa peran komite dalam pembiayaan hanya membantu dalam proses penyusunan RKAS, mengawasi jalannya pembiayaan, serta memberikan evaluasi dan saran dalam pembiayaan sekolah.

“Kalau dulu waktu masih ada SPP ya komite sekolah menjadi mediator atau yang menjembantani antara pihak sekolah dengan orangtua siswa, tapi setelah SPP ditiadakan ya paling komite sekolah hanya membantu dalam proses penyusunan RKAS, mengawasi jalannya pembiayaan, dan memberikan evaluasi dan saran dalam pembiayaan sekolah”. (Hasil Wawancara, Hari Rabu 27 Januari 2016)

Senada dengan pernyataan Bapak BK tersebut, Bapak AS selaku guru yang membantu bendahara sekolah menyatakan sebagai berikut.

“Kalau peranan komite dalam pembiayaan pendidikan itu mengawasi dan mengevaluasi, Mbak. Komite sekolah biasanya terlibat dalam rapat-rapat yang diadakan sekolah serta mendiskusikan kegiatan-

kegiatan yang akan dilaksanakan sekolah. Komite juga memberi masukan atau bahan pertimbangan kepada sekolah serta memberi solusi ketika ada masalah". (Hasil Wawancara, Hari Kamis 4 Februari 2016)

Pernyataan lain dikemukakan Ibu S selaku guru yang membantu bendahara sekolah yang mengungkapkan bahwa:

"Kalau peran komite sekolah dalam pembiayaan itu ya diantaranya memberikan pertimbangan, mendukung kegiatan pendidikan dan sebagai penghubung antara sekolah dengan masyarakat, Mbak. Selain itu, kerjasama komite sekolah juga terjalin dalam penyusunan RKAS sehingga program yang direncanakan dapat terlaksana". (Hasil Wawancara, Hari Jum'at 29 Januari 2016)

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan dalam kutipan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa peran komite sekolah dalam pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo adalah memberi masukan atau arahan, mengawasi, dan mengevaluasi jalannya pembiayaan pendidikan. Selain itu, komite sekolah menjadi penghubung antara sekolah dengan masyarakat agar terjalin kerjasama yang baik.

Sekolah memiliki harapan terkait dengan pembiayaan pendidikan yang ada. Ibu S selaku guru yang membantu bendahara sekolah berharap bahwa agar jumlah siswa meningkat sehingga dana yang diterima juga meningkat. "Ya harapannya kalau siswanya meningkat otomatis kita dapat biayanya juga meningkat. Itu saja harapannya.". (Hasil Wawancara, Hari Jum'at 29 Januari 2016)

Keterangan senada didapat dari Bapak BK selaku Bendahara Sekolah. "Untuk harapannya itu mungkin kalau jumlah muridnya banyak kita kan ada kemajuan, dananya jadi bertambah". (Hasil Wawancara, Hari Rabu 27 Januari 2016)

Sementara itu, pernyataan lain dikemukakan oleh Bapak K selaku Kepala Sekolah. “Harapannya ya kalau bisa dana BOS itu disamakan dengan sekolah yang minimal. Kalau sekarang kembali ke jumlah siswanya”. (Hasil Wawancara, Hari Jum’at 29 Januari 2016)

Pernyataan dari Bapak K tersebut juga didukung oleh pernyataan Bapak AS selaku guru yang membantu bendahara berikut ini.

“Harapannya kalau bisa distandarkan lagi seperti yang dulu. Jadi antara sekolah yang sedikit siswa dengan yang banyak itu jangan murni sesuai dengan jumlah siswa, tapi ada batas minimal seperti yang dulu. Di bawah 60 dana kita sedikit ada nominal yang distandarkan”. (Hasil Wawancara, Hari Kamis 4 Februari 2016)

Dari berbagai pendapat yang telah dikemukakan dalam kutipan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa harapan sekolah dalam pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo adalah agar jumlah siswa di sekolah tersebut meningkat sehingga dana yang diterima juga meningkat. Selain itu, harapan lainnya adalah agar pemberian dana tersebut distandarkan seperti tahun sebelumnya, sekolah yang sedikit siswa dengan yang banyak siswa tidak murni sesuai dengan jumlah siswa, tetapi harus ada batas minimal seperti dahulu.

C. Pembahasan

1. Pembiayaan Pendidikan di SD Negeri Ngrojo Tahun Ajaran 2015/2016

Sekolah sebagai salah satu tempat penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar secara formal tentunya ingin menyelenggarakan pendidikan yang baik dan berkualitas, begitu pula dengan SD Negeri Ngrojo. Untuk itu,

sekolah menyusun program-program yang akan dilaksanakan ke dalam RKAS. Selain program-program kegiatan sekolah, dalam RKAS tersebut juga tercantum sumber dana serta rincian dana yang dibutuhkan guna melaksanakan program-program tersebut.

Dana pendidikan merupakan sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. Dana pendidikan dibutuhkan untuk membiayai operasional sekolah mulai dari pengadaan sarana ruang belajar, pengadaan peralatan, alat-alat dan buku pelajaran, ATK, kegiatan ekstrakurikuler, maupun kegiatan pengelolaan pendidikan sampai memperbaiki atau menambah fasilitas sekolah. Besarnya dana yang diterima setiap sekolah bergantung pada sumber dana. Sumber dana pendidikan merupakan pihak-pihak yang memberikan bantuan subsidi dan sumbangan kepada lembaga pendidikan. BOS merupakan sumber dana utama ditambah dengan BOS dari pemerintah daerah. Dengan demikian, seluruh kegiatan yang ada dalam RKAS itu dibiayai dengan menggunakan dana BOS.

Sebagai sekolah negeri, SD Negeri Ngrojo tidak diperkenankan melakukan pungutan apapun terhadap orang tua siswa terkait dengan pemenuhan kebutuhan operasional sekolah. Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Dasar. Pasal 9 Ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Dasar menyatakan bahwa satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan.

Undang-undang dan Peraturan Menteri tersebut diatas telah menjelaskan larangan dilakukannya pungutan jenis apapun di sekolah negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat ataupun daerah. Pemerintah menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan. Aturan tersebut juga memuat ancaman sanksi bagi yang melanggar. Bagi yang melanggar mendapat sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan hukum pidana penjara.

Dana pendidikan yang diterima oleh SD Negeri Ngrojo pada Tahun Ajaran 2015/2016 berjumlah Rp 40.180.000,00. Jumlah dana tersebut berasal dari BOS Pusat/BOS Regulersebesar Rp 27.200.000,00; BOS Provinsi/BOSDA sebesar Rp 4.840.000,00; dan BOS Kabupaten sebesar Rp 8.140.000,00. Dana tersebut dirasa sangat sedikit untuk membiayai keseluruhan komponen maupun program pendidikan di SD Negeri Ngrojo, sehingga sekolah terpaksa harus berusaha untuk dapat mencukupkan dana yang ada agar program tetap berjalan serta dengan meminimalisir program-programnya dan memprioritaskan program yang dianggap lebih penting.

SD Negeri Ngrojo menyusun RKAS yang di dalamnya mencakup pembiayaan pendidikan yang ada di sekolah. Pembiayaan pendidikan tersebut mencakup sumber dana dan jumlahnya, beserta rincian-rincian penggunaan dana tersebut. Program-program kegiatan yang tercantum

dalam RKAS diuraikan berdasarkan kelompok kebutuhannya masing-masing, dimana setiap kelompok tersebut merupakan upaya untuk mengembangkan delapan Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan merupakan standar minimal tentang sistem pendidikan di seluruh Indonesia dan dijadikan sebagai tolok ukur pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Standar Nasional Pendidikan meliputi Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan, dan Standar Penilaian Pendidikan. Jika sekolah dapat memenuhi seluruh delapan Standar Nasional Pendidikan, maka mutu pendidikan di Indonesia terjamin.

RKAS menjadi acuan dalam pelaksanaan program sekolah, meskipun begitu terkadang ada program yang tidak jadi dilaksanakan. Hal ini dikarenakan adanya program insidental yang lebih mendesak dan lebih penting untuk dilaksanakan. Adanya program insidental membuat sekolah terpaksa harus mengurangi alokasi dana dari program lainnya, sehingga realisasi penggunaan dana akan berbeda dengan yang telah direncanakan.

RKAS SD Negeri Ngrojo Tahun Ajaran 2015/2016 menunjukkan bahwa sekolah telah mengalokasikan sejumlah dana untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan, yaitu Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan, dan Standar Penilaian Pendidikan, namun tidak untuk Standar

Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Sekolah tidak membuat program terkait dengan standar pendidik dan tenaga kependidikan dikarenakan memang dana yang ada sangat terbatas.

Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria mengenai kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. SD Negeri Ngrojo mengalokasikan dana sebesar Rp 3.664.050,00 dalam mengembangkan Standar Kompetensi Lulusan. Berdasarkan RKAS, sekolah mengalokasikan dana tersebut untuk membiayai beberapa program yang telah direncanakan diantaranya pelajaran tambahan/ pendalaman materi/les sebesar Rp 1.000.000,00; pelaksanaan uji coba UASBN/UN Tk. Sekolah sebesar Rp 525.000,00; pelaksanaan uji coba UASBN/UN Tk. Kabupaten sebesar Rp 1.750.050,00; pelaksanaan Ujian Sekolah sebesar Rp 189.000,00; dan pelaksanaan Ujian Nasional sebesar Rp 200.000,00. Terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas lulusan peserta didik dan tercapainya mutu sekolah yang lebih baik.

Standar Isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu

(Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan). Berdasarkan RKAS, sekolah mengalokasikan dana sebesar Rp 1.429.750,00 untuk pengembangan Standar Isi. Dana tersebut digunakan sekolah untuk penyusunan kurikulum sebesar Rp 109.900,00; penyusunan silabus sebesar Rp 334.950,00; dan penyusunan RPP dan skenario pembelajaran sebesar Rp 984.900,00. Pada kenyataannya seperti yang sudah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, jumlah dana yang dialokasikan tersebut ternyata belum mencukupi. Dari hasil wawancara dengan salah seorang narasumber peneliti menemukan bahwa terkadang dalam pembuatan RPP menggunakan uang pribadi guru. Hal ini membuktikan bahwa jumlah anggaran dalam RKAS ternyata tidak mencukupi biaya pembuatan RPP.

SD Negeri Ngrojo memberikan perhatian yang besar pada pengembangan Standar Proses. Standar Proses merupakan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada suatu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Sekolah mengalokasikan dana sebesar Rp 6.069.350,00 untuk pengembangan standar proses. Berdasarkan RKAS, alokasi dana tersebut digunakan untuk membiayai beberapa program seperti workshop peningkatan kompetensi pengembangan sebesar Rp 471.000,00; pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru (PPDB) sebesar Rp 127.900,00; pelaksanaan lomba OSN sebesar Rp 205.000,00; penyelenggaraan pentas seni/ FLS2N sebesar Rp 860.000,00; penyelenggaraan pesantren kilat sebesar Rp 300.450,00;

pengadaan sarana penunjang kegiatan belajar sebesar Rp 1.854.500,00; pengadaan bahan praktik keterampilan sebesar Rp 770.500,00; dan pengadaan buku perpustakaan sebesar Rp 1.480.000,00. Beberapa program kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di SD Negeri Ngrojo.

Sekolah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 8.854.050,00 dalam mengembangkan Standar Sarana dan Prasarana. Berdasarkan RKAS, dana tersebut digunakan untuk membiayai berbagai program seperti pengadaan komputer sebesar Rp 1.075.050,00; pengadaan ATK proses pembelajaran sebesar Rp 993.000,00; pengadaan buku pelajaran pokok peserta didik sebesar Rp 625.000,00; perawatan ruang kelas sebesar Rp 3.556.000,00; perawatan ruang perpustakaan Rp 450.000,00; instalasi listrik (termasuk penggantian lampu) sebesar Rp 1.221.000,00; pemberian administrasi/ inventarisasi bangunan sebesar Rp 120.000,00; dan pengadaan alat kebersihan sebesar Rp 814.000,00. Alokasi dana untuk mengembangkan standar sarana dan prasarana sekolah akan menunjang proses pembelajaran di sekolah. Dana yang dialokasikan tersebut dirasa sekolah kurang untuk membiayai program-program yang telah direncanakan, misalnya dalam perawatan ruang kelas. Sekolah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 3.556.000,00 untuk perawatan ruang kelas. Berdasarkan hasil penelitian, keadaan beberapa ruang kelas masih kurang perhatian, misalnya meja dan kursi yang tidak tertata, lantai masih tegel abu-abu dan ruang kelas yang berantakan serta banyaknya debu di

ruangan tersebut seperti tidak pernah digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Dilihat dari keadaan yang demikian, maka peneliti melihat bahwa dana yang dialokasikan tersebut memang dirasa kurang. Begitu pula dengan ruang perpustakaan. Alokasi dana untuk perawatan ruang perpustakaan berjumlah Rp 450.000,00. Berdasarkan hasil penelitian, keadaan ruang perpustakaan di SD Negeri Ngrojo tidak layak. Buku-buku tidak tertata tetapi hanya ditumpuk, banyak debu, dan barang-barang yang ditumpuk sehingga ruangan tersebut tidak terlihat seperti perpustakaan melainkan seperti gudang dan tidak pernah digunakan sebagaimana layaknya ruang perpustakaan. Keadaan perpustakaan yang seperti ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai dana yang dialokasikan untuk pengadaan buku perpustakaan, karena pada saat melakukan penelitian peneliti tidak melihat adanya buku-buku baru di dalam perpustakaan, yang ada hanya buku-buku lama yang ditumpuk seperti tidak pernah digunakan.

Sekolah mengembangkan Standar Pengelolaan dengan mengalokasikan dana sebesar Rp 2.175.000,00. Berdasarkan RKAS, dana tersebut digunakan untuk membiayai beberapa program diantaranya Penyusunan program RAPBS/RKAS sebesar Rp 225.000,00; Penyusunan Laporan Aset Sekolah sebesar Rp 1.000.000,00; Pengembangan Sistem Informasi Manajemen sebesar Rp 300.000,00; dan Penyelenggaraan Karang Pamitran/ Kemah bersama sebesar Rp 650.000,00.

Sekolah mengalokasikan dana terbesar pada pengembangan Standar Pembiayaan Pendidikan. Standar pembiayaan pendidikan yaitu standar yang

mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Sekolah mengalokasikan sebesar Rp 11.179.900,00. Berdasarkan RKAS, jumlah tersebut oleh sekolah digunakan untuk membiayai beberapa program diantaranya untuk konsumsi guru/pegawai sebesar Rp 2.331.000,00; penyelenggaraan sosialisasi dan pelaporan program sebesar Rp 1.093.900,00; pembayaran rek. Listrik sebesar Rp 900.000,00; pembayaran langganan internet sebesar Rp 750.000,00; pembayaran langganan PDAM sebesar Rp 900.000,00; pembayaran honor guru tidak tetap sebesar Rp 3.260.000,00; pembayaran honor penjaga sekolah/satpam/pegawai sebesar Rp 1.320.000,00; penyelenggaraan penerimaan sumbangan pendidikan sebesar Rp 80.000,00; bantuan siswa miskin sebesar Rp 125.000,00; dan pembelian kebutuhan UKS sebesar Rp 420.000,00. Adanya alokasi dana yang cukup besar tersebut diharapkan proses pembelajaran di sekolah dapat terselenggara dengan baik sehingga menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Pada kenyataannya, berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa di SD Negeri Ngrojo tidak terdapat ruang UKS, namun terdapat ruang alat peraga yang dimaksudkan untuk UKS yang di dalamnya terdapat tempat tidur, keadaannya sangat minim bahkan karena memang awalnya adalah tempat penyimpanan alat peraga olahraga maka di dalamnya digunakan untuk menyimpan papan catur, bet tenis meja, dan peralatan lainnya. Ruangan ini terlihat seperti gudang, karena benda-benda di dalamnya tidak tertata. Selain

itu, kelengkapan obat-obatan P3K untuk menunjang UKS juga tidak tersedia lengkap.

SD Negeri Ngrojo mengalokasikan sejumlah dana untuk mengembangkan Standar Penilaian Pendidikan sebesar Rp 6.807.900,00. Berdasarkan RKAS, dana tersebut digunakan sekolah untuk membiayai beberapa program seperti untuk penyusunan kisi-kisi UKK sebesar Rp 75.000,00; penyusunan kisi-kisi UAS sebesar Rp 132.000,00; penyusunan soal UH sebesar Rp 1.824.000,00; penyusunan soal UTS sebesar Rp 1.425.000,00; penyusunan soal UKK Rp 863.900,00; penyusunan soal UAS sebesar Rp 261.000,00; pelaksanaan penilaian UH sebesar Rp 175.000,00; pelaksanaan penilaian UTS sebesar Rp 582.000,00; pelaksanaan penilaian UAS sebesar Rp 270.000,00; dan pelaksanaan penilaian UKK Rp 1.200.000,00. Sekolah berusaha menyelenggarakan pendidikan yang baik dan berkualitas serta menginginkan peserta didiknya berprestasi dalam bidang akademik dan menghasilkan lulusan yang berkualitas.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa dengan dana yang ada walaupun terbatas, SD Negeri Ngrojo berusaha untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan dan menjalankan program-program sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Dalam menyusun program dan rencana belanja, sekolah telah membuatnya berdasarkan petunjuk dan pedoman yang ditetapkan. Namun pelaksanaannya, dalam mengambil kebijakan untuk menentukan program

dari RKAS yang sudah dibuat dan melaksanakan pembiayaan program tersebut, kepala sekolah menggunakan skala prioritas. Hal ini dilakukan mengingat jumlah dana yang real di sekolah berdasarkan jumlah siswa yang alokasinya digunakan untuk membiayai keseluruhan komponen dan program sekolah. Jumlah peserta didik di sekolah ini hanya berjumlah 34 anak, sehingga besaran dana yang diterima hanya berjumlah Rp 40.180.000,00. Melihat kenyataan ini berarti antara jumlah peserta didik, besaran dana yang diterima dan yang dikeluarkan saling terkait dan berbanding lurus.

Pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo menggunakan skala prioritas dalam pelaksanaannya. Hal tersebut terlihat jelas dari segi sarana dan prasarana. Sekolah membiayai hal-hal yang dianggap penting terlebih dahulu dalam hal ini bangunan dan kemudian baru membenahi sarana yang lain pada tahun berikutnya. Selain itu apabila ada kegiatan yang sifatnya insidental yang dianggap lebih penting untuk dilaksanakan, maka sekolah harus mengurangi alokasi dana dari program lainnya. Begitu pula dengan program-program yang lain, apabila belum terlaksana pada tahun berjalan maka akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil penelitian dan tinjauan RKAS Tahun Ajaran 2015/2016 yang dilakukan peneliti, contoh beberapa program yang terlihat belum terlaksana secara optimal adalah pengadaan buku perpustakaan, perawatan ruang perpustakaan, dan pengadaan kebutuhan UKS. Hal tersebut dikarenakan pada saat melakukan observasi, peneliti melihat bahwa di

perpustakaan tidak tersedia buku-buku baru, yang ada hanya buku-buku lama yang bertumpuk-tumpuk dan seperti tidak pernah digunakan. Penataan ruang perpustakaan juga berantakan, malah terlihat seperti gudang, begitu pula yang terjadi pada ruang UKS. SD Negeri Ngrojo sebenarnya tidak memiliki ruang UKS, namun sekolah menggunakan ruang alat peraga untuk digunakan sebagai UKS dengan hanya menempatkan tempat tidur di dalamnya. Padahal dalam RKAS yang dibuat dana untuk beberapa hal diatas sudah dialokasikan.

Program-program yang ada dalam RKAS tersebut memang tidak semuanya dapat dilaksanakan, karena menurut penuturan kepala sekolah pihak sekolah hanya melaksanakan program-program yang mendesak dan penting. Jadi, memang ada program-program yang tercantum pada RKAS namun tidak dapat dilaksanakan karena kurangnya dana dan ditunda pelaksanaannya pada tahun berikutnya. Namun, dalam pelaporannya sekolah tetap menuliskannya sama dengan yang ada dalam rencana kegiatan meskipun kenyataannya tidak demikian. Hal tersebut membuktikan bahwa masih kurangnya baiknya manajemen pembiayaan yang ada di sekolah ini.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka ada baiknya pemerintah memberi kebijakan mengenai penambahan dana terlebih pada sekolah yang memiliki jumlah siswa yang sedikit. Selain itu juga transparansi pembiayaan yang dilakukan sekolah harus lebih ditingkatkan agar tidak terjadinya ketidaksesuaian antara nominal yang tertulis dalam RKAS dengan hasil dari pelaksanaannya.

2. Hambatan yang Dihadapi dalam Pembiayaan Pendidikan di SD Negeri Ngrojo Tahun Ajaran 2015/2016

Hambatan/ kendala seringkali tidak dapat terlepas dalam setiap pelaksanaan aktivitas atau kegiatan, begitu pula dalam pembiayaan pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian, hambatan yang ada dalam pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo yaitu sekolah tidak dapat melakukan pungutan terhadap orang tua siswa. Tidak diperbolehkannya sekolah melakukan pungutan apapun terhadap orang tua siswa menyebabkan sekolah hanya bergantung pada bantuan dana dari pemerintah. Dana dari pemerintah jumlahnya terbatas, hal tersebut dikarenakan dana dari pemerintah yang diberikan kepada sekolah ditentukan berdasarkan jumlah siswanya. Keterbatasan dana yang dimiliki SD Negeri Ngrojo menyebabkan sarana dan prasarana pendidikan yang ada di sekolah tersebut menjadi kekurangan, seperti tidak memiliki kantin sekolah, UKS, beberapa ruang kelas tidak layak serta banyak meja dan kursi yang sudah rusak. Selain itu, keterbatasan dana pendidikan yang dimiliki menyebabkan sekolah kesulitan dalam mengembangkan program/kegiatan. Kegiatan seperti ekstrakurikuler, pembinaan olimpiade, dan pembiayaan lain menjadi terhambat bahkan terhenti. Apabila keadaan ini terjadi terus menerus, dikhawatirkan akan mempengaruhi kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Hambatan lain dalam pembiayaan pendidikan di sekolah ini adalah kurang berkompetennya pengelola dana disebabkan tidak adanya regenerasi bendahara sekolah yang bersedia mengelola dana yang diterima. Bendahara

sekolah di SD N Ngrojo juga bertanggungjawab sebagai guru kelas sehingga guru tersebut mengemban dua tugas berbeda yang sama besar.

Munculnya hambatan dalam pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo menyebabkan sekolah harus berusaha untuk mengatasinya. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan berusaha meminimalisir pengeluaran dana dan dengan skala prioritas yaitu mendahulukan program yang lebih penting serta berusaha mengoptimalkan sumber daya yang ada. Hal ini sesuai dengan kebijakan sekolah karena dana yang diperoleh dari pemerintah sangat terbatas jumlahnya sehingga sekolah harus dapat mengelolanya dengan sebaik mungkin. Untuk meminimalisir hambatan-hambatan yang ada, seperti kurangnya dana seringkali guru-guru dan kepala sekolah melakukan iuran untuk mencukupinya.

Partisipasi dari semua pihak terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah sangat diperlukan demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Komite sekolah merupakan salah satu pihak yang memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, salah satunya dalam pembiayaan pendidikan. Peranan komite sekolah dalam pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo memiliki peranan antara lain memberi masukan atau arahan, mengawasi, dan mengevaluasi jalannya pembiayaan pendidikan. Selain itu, komite sekolah menjadi penghubung antara sekolah dengan masyarakat agar terjalin kerjasama yang baik. Anggota komite sekolah di SD Negeri Ngrojo terdiri dari kepala sekolah, bendahara sekolah, dan orang tua serta beberapa tokoh masyarakat sekitar

sekolah. Sebelum adanya kebijakan pemerintah mengenai wajib belajar 9 tahun, komite sekolah juga berperan menjembatani pihak sekolah dan orangtua/ masyarakat untuk menentukan besarnya biaya SPP yang harus dibayarkan, namun setelah ada kebijakan tersebut, peran komite sekolah menjadi lebih ringan. Saat ini peran komite sekolah adalah sebagai pemberi masukan atau arahan, pengawas, dan pengevaluasi jalannya pembiayaan pendidikan. Peran-peran tersebut dilaksanakan saat sekolah mengadakan rapat-rapat komite membahas RKAS dan laporan pertanggungjawaban. RKAS disusun berdasarkan kesepakatan semua pihak melalui rapat. Pada rapat tersebut biasanya guru menyampaikan kebutuhan kelasnya kemudian membahas kebutuhan sekolah secara umum dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Komite sekolah dan orangtua siswa bisa mengajukan keberatan atau memberi saran tentang RKAS tersebut. Ketika RKAS sudah disetujui, selanjutnya menjadi RKAS permanen yang ditandatangani oleh kepala sekolah, komite sekolah, dan dinas pendidikan.

Pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo mengalami kekurangan dana, sementara ada banyak komponen maupun kegiatan yang harus dibiayai. Hal tersebut memunculkan harapan dari pihak sekolah agar pelaksanaan berikutnya menjadi lebih baik. Berdasarkan hasil penelitian, harapan sekolah dalam pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo yaitu agar jumlah siswa di sekolah tersebut meningkat sehingga dana yang diterima juga meningkat. Selain itu, harapan lainnya adalah agar pemberian dana tersebut distandardkan seperti tahun sebelumnya, sekolah yang sedikit

siswa dengan yang banyak siswa tidak murni sesuai dengan jumlah siswa, tetapi harus ada batas minimal seperti dahulu. Hal ini dimaksudkan agar dana yang diperoleh dapat memenuhi pembiayaan secara optimal sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai.

D. Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang berjudul Pembiayaan Pendidikan di SD Negeri Ngrojo Nanggulan Kulon Progo ini memiliki keterbatasan yaitu data penelitian yang seharusnya diperoleh dari kepala sekolah, komite sekolah, dan bendahara sekolah, namun hanya diperoleh dari kepala sekolah dan bendahara sekolah saja.

BAB V **KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo Tahun Ajaran 2015/2016 berasal dari BOS Pusat/ BOS Reguler, BOS Provinsi/ BOSDA, dan BOS Kabupaten dengan jumlah Rp 40.180.000,00 yang pengalokasiannya digunakan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan, diantaranya Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan, dan Standar Penilaian Pendidikan, kecuali Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Namun pada kenyataannya, terdapat ketidaksesuaian antara pembiayaan yang tertuang dalam RKAS dengan hasil pelaksanaannya.
2. Hambatan yang ada dalam pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo yaitu terbatasnya dana yang diterima dari pemerintah, sekolah tidak dapat melakukan pungutan terhadap orang tua siswa, serta sedikitnya jumlah siswa.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran yaitu:

1. Bagi Dinas Pendidikan

Melihat keadaan bahwa ada sekolah yang mengalami kekurangan dana akibat sedikitnya jumlah peserta didik, sebaiknya dinas pendidikan membuat kebijakan mengenai pemberian bantuan dana bagi sekolah yang mengalami kekurangan peserta didik.

2. Bagi Sekolah

Diharapkan sekolah dapat menyusun RKAS sesuai dengan kondisi dana yang ada sehingga program-program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan RKAS yang telah dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Prastowo. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Barnawi & Mohammad Arifin. (2012). *Schoolpreneurship: Mengembangkan Jiwa & Sikap Kewirausahaan Siswa*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- B. Suryosubroto. 2004. *Manajemen Pendidikan di Sekolah*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Dadang Suhardan, dkk. (2010). *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Deddy Mulyana. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Dedi Supriadi. (2003). *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Dina Sofianah. (2015). *Manajemen Keuangan pada Sekolah Dasar*. Diakses dari https://www.academia.edu/9700761/Manajemen_Keuangan_pada_Sekolah_Dasar_1 pada tanggal 22 Desember 2015.
- Fuad Ihsan. 2013. *Dasar-dasar Kependidikan*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Haris Herdiansyah. (2013). *Wawancara, Observasi, Focus Group*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Harsono. (2007). *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
- Jhonatan Sarwono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Lexy J. Moleong. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Matin. (2014). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moch. Idochi Anwar. (2003). *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan (Teori, Konsep dan Isu)*. Bandung: Alfabeta.

- . (2013). *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muljani A. Nurhadi. (2011). *Dilema Kebijakan Pendanaan Pendidikan*. Yogyakarta: Nurhadi Center.
- Mulyasa. (2003). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyono. (2010). *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Nana Syaodih Sukmadinata. (2006). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nanang Fattah. (2004). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nusa Putera. (2012). *Penelitian Kualitatif Proses & Aplikasi*. Jakarta: PT Indeks.
- Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2/VII/PB/2014, Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
- Sri Minarti. (2011). *Manajemen Sekolah*. Jakarta: Ar Ruzz Media.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Cetakan ke 19*. Bandung: Alfabeta.
- Suharjo. (2006). *Mengenal Pendidikan Sekolah Dasar Teori dan Praktek*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat Ketenagaan.
- Suharsimi Arikunto. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- TIM Dosen AP FIP UNY. (2010). *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Uhar Suharsaputra. (2013). *Administrasi Pendidikan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD Negeri Ngrojo
Tahun 2015/2016

No.	Nama	NIP	Pangkat/ Gol. Ruang	Pend.	Tugas
1.	Kuntadi, S.Ag	19640502 198509 1 001	Pembina, IV/a	S.1	Ka.Sek
2.	Suratiyem	19650410 200701 2 005	Peng TK I, II/d	SPG	Gr Kl I
3.	Pariyem S.Pd.SD	19620723 198204 2 005	Pembina, IV/a	S.1	Gr Kl II
4.	Tri Rahayu. A.Ma.Pd	19560502 198303 2 001	Pembina, IV/a	DII	Gr Kl III
5.	B. Kusbantarjo, S.Pd	19580331 198303 1 003	Pembina, IV/a	S.1	Gr Kl IV
6.	Arif Sigit Sulistiyo	19831011 201406 1 001	Peng.Md, II/a	SLTA	Gr Kl V
7.	Supriyani, S.Pd.SD	19710729 199103 2 004	Pembina, IV/a	S.1	Gr Kl VI
8.	Rr. Titi Sunarni, A.Ma	19630423 198403 2 009	Pembina, IV/a	D.II	Gr Penjas
9.	Dalwasingah, A.Ma	19560519 197903 2 002	Pembina, IV/a	D.II	Gr PAI
10.	Diniek Ari Kresnawati, S.Pd	-	-	S.1	GTT
11.	Pardiyo	-	-	SLTA	Penjaga

Lampiran 2. Keadaan Peserta Didik Tahun Ajaran 2015/2016

No.	Kelas	Tahun Pelajaran 2015/ 2016			
		Jml Rombel	L	P	Jumlah
1.	I	1	1	1	2
2.	II	1	2	2	4
3.	III	1	4	2	6
4.	IV	1	3	2	5
5.	V	1	2	4	6
6.	VI	1	6	5	11
Jumlah		6	19	16	34

Lampiran 3. RKAS SD Negeri Ngrojo Tahun Ajaran 2015/2016

PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH			
		APBN	APBD PROP	APBD KAB	SUMBER LAI WALI MURID YANG SAH
PENDAPATAN					
KA APBN	27.200.000	27.200.000	0	0	0
KS Pusat	27.200.000	27.200.000	0	0	0
BOS Pusat	27.200.000	27.200.000	0	0	0
KA APBD PROVINSI	4.840.000	0	4.840.000	0	0
KS Provinsi	4.840.000	0	4.840.000	0	0
BOS Provinsi	4.840.000	0	4.840.000	0	0
KA APBD KABUPATEN	8.140.000	0	0	8.140.000	0
KS Kabupaten	8.140.000	0	0	8.140.000	0
BOS Kabupaten	8.140.000	0	0	8.140.000	0
JUMLAH PENDAPATAN	40.180.000	27.200.000	4.840.000	8.140.000	0
BELANJA					
Pelaksanaan Kompetensi Lulusan	3.664.050	3.139.050	0	525.000	0
Pelajaran tambahan/pendalaman materi/les	1.000.000	1.000.000	0	0	0
Pelajaran tambahan/pendalaman materi/les	1.000.000	1.000.000	0	0	0
Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Sekolah	525.000	0	0	525.000	0
Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Sekolah	525.000	0	0	525.000	0
Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Kabupaten	1.750.050	1.750.050	0	0	0
Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Kabupaten	1.750.050	1.750.050	0	0	0
Pelaksanaan Ujian Sekolah	189.000	189.000	0	0	0
Pelaksanaan Ujian Sekolah	189.000	189.000	0	0	0
Pelaksanaan Ujian Nasional	200.000	200.000	0	0	0
Pelaksanaan Ujian Nasional	200.000	200.000	0	0	0
Pekerjaan Isi	1.429.750	1.429.750	0	0	0
Penyusunan Kurikulum	109.900	109.900	0	0	0
Penyusunan Kurikulum	109.900	109.900	0	0	0
Penyusunan Silabus	334.950	334.950	0	0	0
Penyusunan Silabus	334.950	334.950	0	0	0
Penyusunan RPP dan Skenario Pembelajaran	984.900	984.900	0	0	0
Penyusunan RPP dan Skenario Pembelajaran	984.900	984.900	0	0	0

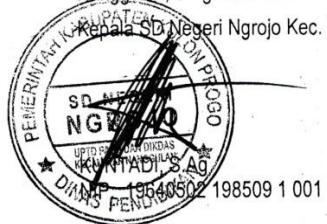
PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH				
		APBN	APBD PROP	APBD KAB	MASYARAKAT/WALI MURID	SUMBER LAI YANG SAH
Panduan Proses	6.069.350	4.589.350	1.480.000	0	0	
Workshop peningkatan kompetensi pengembangan	471.000	471.000	0	0	0	
Workshop peningkatan kompetensi pengembangan	471.000	471.000	0	0	0	
Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB)	127.900	127.900	0	0	0	
Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB)	127.900	127.900	0	0	0	
Pelaksanaan Lomba OSN	205.000	205.000	0	0	0	
Pelaksanaan Lomba OSN	205.000	205.000	0	0	0	
Penyelenggaraan Pentas Seni/FLS2N	860.000	860.000	0	0	0	
Penyelenggaraan Pentas Seni/FLS2N	860.000	860.000	0	0	0	
Penyelenggaraan Pesantren Kilat	300.450	300.450	0	0	0	
Penyelenggaraan Pesantren Kilat	300.450	300.450	0	0	0	
Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar	1.854.500	1.854.500	0	0	0	
Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar	1.854.500	1.854.500	0	0	0	
Pengadaan Bahan Praktik Keterampilan	770.500	770.500	0	0	0	
Pengadaan Bahan Praktik Keterampilan	770.500	770.500	0	0	0	
Pengadaan Buku Perpustakaan	1.480.000	0	1.480.000	0	0	
Pengadaan Buku Perpustakaan	1.480.000	0	1.480.000	0	0	
Peralatan Sarana dan Prasarana	8.854.050	1.970.050	965.000	5.919.000	0	
Pengadaan Komputer	1.075.050	1.075.050	0	0	0	
Pengadaan Komputer	1.075.050	1.075.050	0	0	0	
Pengadaan ATK Proses Pembelajaran dan ATK	993.000	0	365.000	628.000	0	
Pengadaan ATK Proses Pembelajaran dan ATK	993.000	0	365.000	628.000	0	
Pengadaan Buku Pelajaran Pokok Peserta Didik	625.000	625.000	0	0	0	
Pengadaan Buku Pelajaran Pokok Peserta Didik	625.000	625.000	0	0	0	
Perawatan Ruang kelas	3.556.000	0	300.000	3.256.000	0	
Perawatan Ruang kelas	3.556.000	0	300.000	3.256.000	0	
Perawatan Ruang perpustakaan	450.000	150.000	300.000	0	0	
Perawatan Ruang perpustakaan	450.000	150.000	300.000	0	0	
Instalasi listrik (termasuk penggantian lampu)	1.221.000	0	0	1.221.000	0	
Instalasi listrik (termasuk penggantian lampu)	1.221.000	0	0	1.221.000	0	
Pembenahan administrasi/inventarisasi bangunan	120.000	120.000	0	0	0	
Pembenahan administrasi/inventarisasi bangunan	120.000	120.000	0	0	0	
Pengadaan Alat Kebersihan	814.000	0	0	814.000	0	
Pengadaan Alat Kebersihan	814.000	0	0	814.000	0	
Bantuan Pengelolaan	2.175.000	875.000	300.000	1.000.000	0	
Penyusunan Program RAPBS/RAKS	225.000	225.000	0	0	0	
Penyusunan Program RAPBS/RAKS	225.000	225.000	0	0	0	
Penyusunan Laporan aset sekolah	1.000.000	0	0	1.000.000	0	
Penyusunan Laporan aset sekolah	1.000.000	0	0	1.000.000	0	

PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH				
		A P B N	APBD PROP	APBD KAB	MASYARAKAT/ WALI MURID	SUMBER LAI YANG SAH
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen	300.000	0	300.000	0	0	
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen	300.000	0	300.000	0	0	
Penyelenggaraan Karang Pamitran/kemah bersama	650.000	650.000	0	0	0	
Penyelenggaraan Karang Pamitran/kemah bersama	650.000	650.000	0	0	0	
Biaya Pembentukan Pendidikan	11.179.900	10.125.900	1.054.000	0	0	
Consumsi Guru / Pegawai	2.331.000	2.331.000	0	0	0	
Consumsi Guru / Pegawai	2.331.000	2.331.000	0	0	0	
Penyelenggaraan sosialisasi dan pelaporan program,	1.093.900	819.900	274.000	0	0	
Penyelenggaraan sosialisasi dan pelaporan program,	1.093.900	819.900	274.000	0	0	
Pembayaran Rek Listrik	900.000	900.000	0	0	0	
Pembayaran Rek Listrik	900.000	900.000	0	0	0	
Pembayaran langganan internet	750.000	750.000	0	0	0	
Pembayaran langganan internet	750.000	750.000	0	0	0	
Pembayaran langganan PDAM	900.000	900.000	0	0	0	
Pembayaran langganan PDAM	900.000	900.000	0	0	0	
Pembayaran Honor Guru Tidak Tetap	3.260.000	2.480.000	780.000	0	0	
Pembayaran Honor Guru Tidak Tetap	3.260.000	2.480.000	780.000	0	0	
Pembayaran Honor penjaga sekolah/satpam/pegawai	1.320.000	1.320.000	0	0	0	
Pembayaran Honor penjaga sekolah/satpam/pegawai	1.320.000	1.320.000	0	0	0	
Penyelenggaraan penerimaan sumbangan pendidikan	80.000	80.000	0	0	0	
Penyelenggaraan penerimaan sumbangan pendidikan	80.000	80.000	0	0	0	
Bantuan Siswa Miskin	125.000	125.000	0	0	0	
Bantuan Siswa Miskin	125.000	125.000	0	0	0	
Pembelian Kebutuhan UKS	420.000	420.000	0	0	0	
Pembelian Kebutuhan UKS	420.000	420.000	0	0	0	
Biaya Penilaian Pendidikan	6.807.900	5.070.900	1.041.000	696.000	0	
Penyusunan Kisi Kisi Ulangan Kenaikan Kelas	75.000	75.000	0	0	0	
Penyusunan Kisi Kisi Ulangan Kenaikan Kelas	75.000	75.000	0	0	0	
Penyusunan Kisi Kisi Ujian sekolah	132.000	0	0	132.000	0	
Penyusunan Kisi Kisi Ujian sekolah	132.000	0	0	132.000	0	
Penyusunan Soal Ulangan Harian	1.824.000	1.260.000	0	564.000	0	
Penyusunan Soal Ulangan Harian	1.824.000	1.260.000	0	564.000	0	
Penyusunan Soal Ulangan Tengah Semester	1.425.000	1.425.000	0	0	0	
Penyusunan Soal Ulangan Tengah Semester	1.425.000	1.425.000	0	0	0	
Penyusunan Soal Ulangan Kenaikan Kelas	863.900	863.900	0	0	0	
Penyusunan Soal Ulangan Kenaikan Kelas	863.900	863.900	0	0	0	
Penyusunan Soal Ujian sekolah	261.000	0	261.000	0	0	
Penyusunan Soal Ujian sekolah	261.000	0	261.000	0	0	
Pelaksanaan Penilaian Ulangan Harian	175.000	175.000	0	0	0	

PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH				
		APBN	APBD PROP	APBD KAB	MASYARAKAT/ WALI MURID	SUMBER LAI YANG SAH
Pelaksanaan Penilaian Ulangan Harian	175.000	175.000	0	0	0	0
Pelaksanaan Penilaian Ulangan Tengah Semester	582.000	582.000	0	0	0	0
Pelaksanaan Penilaian Ulangan Tengah Semester	582.000	582.000	0	0	0	0
Pelaksanaan Penilaian Ulangan Akhir Semester	270.000	270.000	0	0	0	0
Pelaksanaan Penilaian Ulangan Akhir Semester	270.000	270.000	0	0	0	0
Pelaksanaan Penilaian Ulangan Kenaikan Kelas	1.200.000	420.000	780.000	0	0	0
Pelaksanaan Penilaian Ulangan Kenaikan Kelas	1.200.000	420.000	780.000	0	0	0
JUMLAH BELANJA	40.180.000	27.200.000	4.840.000	8.140.000	0	0

Nanggulan, 8 Agustus 2015

Kepala SD Negeri Ngrojo Kec. Nanggulan



Lampiran 4. RAPBS Tahun Ajaran 2015/2016 SD Negeri Ngrojo

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

ma Sekolah : SD Negeri Ngrojo Kec. Nanggulan
 alamat : Jl. Kenteng-Godean, Ngrojo, Kembang, Nanggulan, KP

PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH			
		A P B N	APBD PROP	APBD KAB	MASYARAKAT/ WALI MURID
PENDAPATAN					
RA APBN	27.200.000	27.200.000	0	0	0
BOS Pusat	27.200.000	27.200.000	0	0	0
BOS Pusat	27.200.000	27.200.000	0	0	0
NA APBD PROVINSI	4.840.000	0	4.840.000	0	0
BOS Provinsi	4.840.000	0	4.840.000	0	0
BOS Provinsi	4.840.000	0	4.840.000	0	0
NA APBD KABUPATEN	8.140.000	0	0	8.140.000	0
BOS Kabupaten	8.140.000	0	0	8.140.000	0
BOS Kabupaten	8.140.000	0	0	8.140.000	0
JUMLAH PENDAPATAN	40.180.000	27.200.000	4.840.000	8.140.000	0
BELANJA					
Penerapan Standar Kompetensi Lulusan	3.664.050	3.139.050	0	525.000	0
Pelajaran tambahan/pendalaman materi/les	1.000.000	1.000.000	0	0	0
Pelajaran tambahan/pendalaman materi/les	1.000.000	1.000.000	0	0	0
Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Sekolah	525.000	0	0	525.000	0
Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Sekolah	525.000	0	0	525.000	0
Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Kabupaten	1.750.050	1.750.050	0	0	0
Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Kabupaten	1.750.050	1.750.050	0	0	0
Pelaksanaan Ujian Sekolah	189.000	189.000	0	0	0
Pelaksanaan Ujian Sekolah	189.000	189.000	0	0	0
Pelaksanaan Ujian Nasional	200.000	200.000	0	0	0
Pelaksanaan Ujian Nasional	200.000	200.000	0	0	0
Penerapan Standar Isi	1.429.750	1.429.750	0	0	0
Penyusunan Kurikulum	109.900	109.900	0	0	0
Penyusunan Kurikulum	109.900	109.900	0	0	0
Penyusunan Silabus	334.950	334.950	0	0	0
Penyusunan Silabus	334.950	334.950	0	0	0
Penyusunan RPP dan Skenario Pembelajaran	984.900	984.900	0	0	0
Penyusunan RPP dan Skenario Pembelajaran	984.900	984.900	0	0	0

PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH			
		APBN	APBD PROP	APBD KAB	MASYARAKAT/WALI MURID
Pelatihan Proses	6.069.350	4.580.350	1.480.000	0	0
Workshop peringkatkan kompetensi pengembangan	471.000	471.000	0	0	0
Workshop peringkatkan kompetensi pengembangan	471.000	471.000	0	0	0
Pencairan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB)	127.900	127.900	0	0	0
Pencairan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB)	127.900	127.900	0	0	0
Kesiagaan Lomba OSN	205.000	205.000	0	0	0
Kesiagaan Lomba OSN	205.000	205.000	0	0	0
Penyelenggaraan Pentas Seni/FLS2N	860.000	860.000	0	0	0
Penyelenggaraan Pentas Seni/FLS2N	860.000	860.000	0	0	0
Penyelenggaraan Pesantren Kilat	300.450	300.450	0	0	0
Penyelenggaraan Pesantren Kilat	300.450	300.450	0	0	0
Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar	1.854.500	1.854.500	0	0	0
Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar	1.854.500	1.854.500	0	0	0
Pengadaan Bahan Praktik Keterampilan	770.500	770.500	0	0	0
Pengadaan Bahan Praktik Keterampilan	770.500	770.500	0	0	0
Pengadaan Buku Perpustakaan	1.480.000	0	1.480.000	0	0
Pengadaan Buku Perpustakaan	1.480.000	0	1.480.000	0	0
Pembelian Sarana dan Prasarana	8.854.050	1.970.050	965.000	5.919.000	0
Pengadaan Komputer	1.075.050	1.075.050	0	0	0
Pengadaan Komputer	1.075.050	1.075.050	0	0	0
Pengadaan ATK Proses Pembelajaran dan ATK	993.000	0	365.000	628.000	0
Pengadaan ATK Proses Pembelajaran dan ATK	993.000	0	365.000	628.000	0
Pengadaan Buku Pelajaran Pokok Peserta Didik	625.000	625.000	0	0	0
Pengadaan Buku Pelajaran Pokok Peserta Didik	625.000	625.000	0	0	0
Perawatan Ruang kelas	3.556.000	0	300.000	3.256.000	0
Perawatan Ruang kelas	3.556.000	0	300.000	3.256.000	0
Perawatan Ruang perpustakaan	450.000	150.000	300.000	0	0
Perawatan Ruang perpustakaan	450.000	150.000	300.000	0	0
Instalasi listrik (termasuk penggantian lampu)	1.221.000	0	0	1.221.000	0
Instalasi listrik (termasuk penggantian lampu)	1.221.000	0	0	1.221.000	0
Pembentahan administrasi/inventarisasi bangunan	120.000	120.000	0	0	0
Pembentahan administrasi/inventarisasi bangunan	120.000	120.000	0	0	0
Pengadaan Alat Kebersihan	814.000	0	0	814.000	0
Pengadaan Alat Kebersihan	814.000	0	0	814.000	0
Pendar Pengelolaan	2.175.000	875.000	300.000	1.000.000	0
Penyusutan Program RAPBS/RAKS	225.000	225.000	0	0	0
Penyusutan Program RAPBS/RAKS	225.000	225.000	0	0	0
Penyusutan Laporan aset sekolah	1.000.000	0	0	1.000.000	0
Penyusutan Laporan aset sekolah	1.000.000	0	0	1.000.000	0

PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH			
		APBN	APBD PROP	APBD KAB	MASYARAKAT/WALI MURID
SUMBER L YANG SA					
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen	300.000	0	300.000	0	0
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen	300.000	0	300.000	0	0
Penyelenggaran Karang Pamitr/kemah bersama	650.000	650.000	0	0	0
Penyelenggaran Karang Pamitr/kemah bersama	650.000	650.000	0	0	0
Biaya Perbiayaan Pendidikan	11.179.900	10.125.900	1.054.000	0	0
Konsultasi Guru / Pegawai	2.331.000	2.331.000	0	0	0
Konsultasi Guru / Pegawai	2.331.000	2.331.000	0	0	0
Penyelenggaraan sosialisasi dan pelaporan program,	1.093.900	819.900	274.000	0	0
Penyelenggaraan sosialisasi dan pelaporan program,	1.093.900	819.900	274.000	0	0
Pembayaran Rek Listrik	900.000	900.000	0	0	0
Pembayaran Rek Listrik	900.000	900.000	0	0	0
Pembayaran Ilangganan Internet	750.000	750.000	0	0	0
Pembayaran Ilangganan internet	750.000	750.000	0	0	0
Pembayaran Ilangganan PDAM	900.000	900.000	0	0	0
Pembayaran Ilangganan PDAM	900.000	900.000	0	0	0
Pembayaran Honor Guru Tidak Tetap	3.250.000	2.460.000	780.000	0	0
Pembayaran Honor Guru Tidak Tetap	3.250.000	2.460.000	780.000	0	0
Pembayaran Honor penjaga sekolah/satpam/pegawai	1.320.000	1.320.000	0	0	0
Pembayaran Honor penjaga sekolah/satpam/pegawai	1.320.000	1.320.000	0	0	0
Penyelenggaraan penerimaan sumbangan pendidikan	80.000	80.000	0	0	0
Penyelenggaraan penerimaan sumbangan pendidikan	80.000	80.000	0	0	0
Bantuan Siswa Miskin	125.000	125.000	0	0	0
Bantuan Siswa Miskin	125.000	125.000	0	0	0
Pembelian Kebutuhan UKS	420.000	420.000	0	0	0
Pembelian Kebutuhan UKS	420.000	420.000	0	0	0
Pendaftaran Penilaian Pendidikan	6.807.900	5.070.900	1.041.000	696.000	0
Penyusunan Kisi Kisi Ulangan Kenakan Kelas	75.000	75.000	0	0	0
Penyusunan Kisi Kisi Ulangan Kenakan Kelas	75.000	75.000	0	0	0
Penyusunan Kisi Kisi Ujian sekolah	132.000	0	0	132.000	0
Penyusunan Kisi Kisi Ujian sekolah	132.000	0	0	132.000	0
Penyusunan Soal Ulangan Harian	1.824.000	1.260.000	0	564.000	0
Penyusunan Soal Ulangan Harian	1.824.000	1.260.000	0	564.000	0
Penyusunan Soal Ulangan Tengah Semester	1.425.000	1.425.000	0	0	0
Penyusunan Soal Ulangan Tengah Semester	1.425.000	1.425.000	0	0	0
Penyusunan Soal Ulangan Kenakan Kelas	863.900	863.900	0	0	0
Penyusunan Soal Ulangan Kenakan Kelas	863.900	863.900	0	0	0
Penyusunan Soal Ujian sekolah	261.000	0	261.000	0	0
Penyusunan Soal Ujian sekolah	261.000	0	261.000	0	0
Pelaksanaan Penilaian Ulangan Harian	175.000	175.000	0	0	0

PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH				SUMBER LAYANG SA
		APBN	APBD PROP	APBD KAB	MASYARAKAT/WALI MURID	
Pelaksanaan Penilaian Ulangan Harian	175.000	175.000	0	0	0	0
Pelaksanaan Penilaian Ulangan Tengah Semester	582.000	582.000	0	0	0	0
Pelaksanaan Penilaian Ulangan Tengah Semester	582.000	582.000	0	0	0	0
Pelaksanaan Penilaian Ulangan Akhir Semester	270.000	270.000	0	0	0	0
Pelaksanaan Penilaian Ulangan Akhir Semester	270.000	270.000	0	0	0	0
Pelaksanaan Penilaian Ulangan Kenaikan Kelas	1.200.000	420.000	780.000	0	0	0
Pelaksanaan Penilaian Ulangan Kenaikan Kelas	1.200.000	420.000	780.000	0	0	0
JUMLAH BELANJA	40.180.000	27.200.000	4.840.000	8.140.000	0	

Nanggulan, 8 Agustus 2015



Lampiran 5. APBS Tahun Ajaran 2015/2016 SD Negeri Ngrojo

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (APBS)
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

a Sekolah : SD Negeri Ngrojo Kec. Nanggulan
 alamat : Jl. Kenteng-Godean, Ngrojo, Kembang, Nanggulan, KP

PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH			
		A P B N	APBD PROP	APBD KAB	MASYARAKAT/ WALI MURID
PENDAPATAN					
APBN	27.200.000	27.200.000	0	0	0
APBN Pusat	27.200.000	27.200.000	0	0	0
APBN Pusat	27.200.000	27.200.000	0	0	0
APBD PROVINSI	4.840.000	0	4.840.000	0	0
Provinsi	4.840.000	0	4.840.000	0	0
Provinsi	4.840.000	0	4.840.000	0	0
APBD KABUPATEN	8.140.000	0	0	8.140.000	0
Kabupaten	8.140.000	0	0	8.140.000	0
Kabupaten	8.140.000	0	0	8.140.000	0
JUMLAH PENDAPATAN	40.180.000	27.200.000	4.840.000	8.140.000	0
BELANJA					
Penilaian Kompetensi Lulusan	3.664.050	3.139.050	0	525.000	0
Belajar tambahan/pendalaman materi/les	1.000.000	1.000.000	0	0	0
Belajar tambahan/pendalaman materi/les	1.000.000	1.000.000	0	0	0
pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Sekolah	525.000	0	0	525.000	0
pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Sekolah	525.000	0	0	525.000	0
pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Kabupaten	1.750.050	1.750.050	0	0	0
pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Kabupaten	1.750.050	1.750.050	0	0	0
pelaksanaan Ujian Sekolah	189.000	189.000	0	0	0
pelaksanaan Ujian Sekolah	189.000	189.000	0	0	0
pelaksanaan Ujian Nasional	200.000	200.000	0	0	0
pelaksanaan Ujian Nasional	200.000	200.000	0	0	0
Surat Iklan	1.429.750	1.429.750	0	0	0
Penyusunan Kurikulum	109.900	109.900	0	0	0
Penyusunan Kurikulum	109.900	109.900	0	0	0
Penyusunan Silabus	334.950	334.950	0	0	0
Penyusunan Silabus	334.950	334.950	0	0	0
Penyusunan RPP dan Skenario Pembelajaran	984.900	984.900	0	0	0
Penyusunan RPP dan Skenario Pembelajaran	984.900	984.900	0	0	0

PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH			
		APBN	APBD PROP	APBD KAB	MASYARAKAT/WALI MURID
Pelatihan Proses	6.069.350	4.580.350	1.480.000	0	0
Workshop peringkatkan kompetensi pengembangan	471.000	471.000	0	0	0
Workshop peringkatkan kompetensi pengembangan	471.000	471.000	0	0	0
Pencairan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB)	127.900	127.900	0	0	0
Pencairan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB)	127.900	127.900	0	0	0
Persaingan Lomba OSN	205.000	205.000	0	0	0
Persaingan Lomba OSN	205.000	205.000	0	0	0
Penyelenggaraan Pentas Seni/FLS2N	860.000	860.000	0	0	0
Penyelenggaraan Pentas Seni/FLS2N	860.000	860.000	0	0	0
Penyelenggaraan Pesantren Kilat	300.450	300.450	0	0	0
Penyelenggaraan Pesantren Kilat	300.450	300.450	0	0	0
Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar	1.854.500	1.854.500	0	0	0
Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar	1.854.500	1.854.500	0	0	0
Pengadaan Bahan Praktik Keterampilan	770.500	770.500	0	0	0
Pengadaan Bahan Praktik Keterampilan	770.500	770.500	0	0	0
Pengadaan Buku Perpustakaan	1.480.000	0	1.480.000	0	0
Pengadaan Buku Perpustakaan	1.480.000	0	1.480.000	0	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana	8.854.050	1.970.050	965.000	5.919.000	0
Pengadaan Komputer	1.075.050	1.075.050	0	0	0
Pengadaan Komputer	1.075.050	1.075.050	0	0	0
Pengadaan ATK Proses Pembelajaran dan ATK	993.000	0	365.000	628.000	0
Pengadaan ATK Proses Pembelajaran dan ATK	993.000	0	365.000	628.000	0
Pengadaan Buku Pelajaran Pokok Peserta Didik	625.000	625.000	0	0	0
Pengadaan Buku Pelajaran Pokok Peserta Didik	625.000	625.000	0	0	0
Perawatan Ruang kelas	3.556.000	0	300.000	3.256.000	0
Perawatan Ruang kelas	3.556.000	0	300.000	3.256.000	0
Perawatan Ruang perpustakaan	450.000	150.000	300.000	0	0
Perawatan Ruang perpustakaan	450.000	150.000	300.000	0	0
Instalasi listrik (termasuk penggantian lampu)	1.221.000	0	0	1.221.000	0
Instalasi listrik (termasuk penggantian lampu)	1.221.000	0	0	1.221.000	0
Pembentahan admin/instrasi/inventarisasi bangunan	120.000	120.000	0	0	0
Pembentahan admin/instrasi/inventarisasi bangunan	120.000	120.000	0	0	0
Pengadaan Alat Kebersihan	814.000	0	0	814.000	0
Pengadaan Alat Kebersihan	814.000	0	0	814.000	0
Pendar Pengelolaan	2.175.000	875.000	300.000	1.000.000	0
Penyusutan Program RAPBS/RAKS	225.000	225.000	0	0	0
Penyusutan Program RAPBS/RAKS	225.000	225.000	0	0	0
Penyusutan Laporan aset sekolah	1.000.000	0	0	1.000.000	0
Penyusutan Laporan aset sekolah	1.000.000	0	0	1.000.000	0

PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH			
		APBN	APBD PROP	APBD KAB	MASYARAKAT/WALI MURID
SUMBER L YANG SA					
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen	300.000	0	300.000	0	0
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen	300.000	0	300.000	0	0
Penyelenggaran Karang Pamitr/kemah bersama	650.000	650.000	0	0	0
Penyelenggaran Karang Pamitr/kemah bersama	650.000	650.000	0	0	0
Biaya Perbiayaan Pendidikan	11.179.900	10.125.900	1.054.000	0	0
Konsultasi Guru / Pegawai	2.331.000	2.331.000	0	0	0
Konsultasi Guru / Pegawai	2.331.000	2.331.000	0	0	0
Penyelenggaraan sosialisasi dan pelaporan program,	1.093.900	819.900	274.000	0	0
Penyelenggaraan sosialisasi dan pelaporan program,	1.093.900	819.900	274.000	0	0
Pembayaran Rek Listrik	900.000	900.000	0	0	0
Pembayaran Rek Listrik	900.000	900.000	0	0	0
Pembayaran Ilangganan Internet	750.000	750.000	0	0	0
Pembayaran Ilangganan internet	750.000	750.000	0	0	0
Pembayaran Ilangganan PDAM	900.000	900.000	0	0	0
Pembayaran Ilangganan PDAM	900.000	900.000	0	0	0
Pembayaran Honor Guru Tidak Tetap	3.250.000	2.460.000	780.000	0	0
Pembayaran Honor Guru Tidak Tetap	3.250.000	2.460.000	780.000	0	0
Pembayaran Honor penjaga sekolah/satpam/pegawai	1.320.000	1.320.000	0	0	0
Pembayaran Honor penjaga sekolah/satpam/pegawai	1.320.000	1.320.000	0	0	0
Penyelenggaraan penerimaan sumbangan pendidikan	80.000	80.000	0	0	0
Penyelenggaraan penerimaan sumbangan pendidikan	80.000	80.000	0	0	0
Bantuan Siswa Miskin	125.000	125.000	0	0	0
Bantuan Siswa Miskin	125.000	125.000	0	0	0
Pembelian Kebutuhan UKS	420.000	420.000	0	0	0
Pembelian Kebutuhan UKS	420.000	420.000	0	0	0
Pendaftaran Penilaian Pendidikan	6.807.900	5.070.900	1.041.000	696.000	0
Penyusunan Kisi Kisi Ulangan Kenakan Kelas	75.000	75.000	0	0	0
Penyusunan Kisi Kisi Ulangan Kenakan Kelas	75.000	75.000	0	0	0
Penyusunan Kisi Kisi Ujian sekolah	132.000	0	0	132.000	0
Penyusunan Kisi Kisi Ujian sekolah	132.000	0	0	132.000	0
Penyusunan Soal Ulangan Harian	1.824.000	1.260.000	0	564.000	0
Penyusunan Soal Ulangan Harian	1.824.000	1.260.000	0	564.000	0
Penyusunan Soal Ulangan Tengah Semester	1.425.000	1.425.000	0	0	0
Penyusunan Soal Ulangan Tengah Semester	1.425.000	1.425.000	0	0	0
Penyusunan Soal Ulangan Kenakan Kelas	863.900	863.900	0	0	0
Penyusunan Soal Ulangan Kenakan Kelas	863.900	863.900	0	0	0
Penyusunan Soal Ujian sekolah	261.000	0	261.000	0	0
Penyusunan Soal Ujian sekolah	261.000	0	261.000	0	0
Pelaksanaan Penilaian Ulangan Harian	175.000	175.000	0	0	0

PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH				
		APBN	APBD PROP	APBD KAB	MASYARAKAT/ WALI MURID	SUMBER LAI YANG SAH
eksanaan Penilaian Ulangan Harian	175.000	175.000	0	0	0	
ksanaan Penilaian Ulangan Tengah Semester	582.000	582.000	0	0	0	
eksanaan Penilaian Ulangan Tengah Semester	582.000	582.000	0	0	0	
ksanaan Penilaian Ulangan Akhir Semester	270.000	270.000	0	0	0	
eksanaan Penilaian Ulangan Akhir Semester	270.000	270.000	0	0	0	
ksanaan Penilaian Ulangan Kenaikan Kelas	1.200.000	420.000	780.000	0	0	
eksanaan Penilaian Ulangan Kenaikan Kelas	1.200.000	420.000	780.000	0	0	
JUMLAH BELANJA	40.180.000	27.200.000	4.840.000	8.140.000	0	

Nanggulan, 8 Agustus 2015

Ketua Komite SD Negeri Ngrojo Kec. Nanggulan

IMAM SOEDARI ATMOKO



Lampiran 6. Surat Izin dan Surat Keterangan Penelitian



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telpo (0274) 540611 pesawat 405, Fax (0274) 5406611
Laman: fip.uny.ac.id, E-mail: humas fip@uny.ac.id



Nomor : 137 / UN34.11/PL/2016
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan izin Penelitian

20 Januari 2016

Yth. Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Setda Provinsi DIY
Kepatihan Danurejan
Yogyakarta

Diberitahukan dengan hormat, bahwa untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik yang ditetapkan oleh Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, mahasiswa berikut ini diwajibkan melaksanakan penelitian:

Nama : Hanifah Yuliani
NIM : 11101241020
Prodi/Jurusan : MP/AP
Alamat : Ploso RT 09 RW 05 Banguncipto, Sentolo, Kulon Progo, Yogyakarta

Sehubungan dengan hal itu, perkenankanlah kami meminta izin mahasiswa tersebut melaksanakan kegiatan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

Tujuan : Memperoleh data penelitian tugas akhir skripsi
Lokasi : SD Negeri Ngrojo
Subjek : Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Bendahara Sekolah
Obyek : Pembiayaan Pendidikan
Waktu : Januari-Maret
Judul : Analisis Pembiayaan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Ngrojo

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih.



Tembusan
1. Rektor (sebagai laporan)
2. Wakil Dekan I FIP
3. Ketua Jurusan AP FIP
4. Kabag TU
5. Kasubbag Pendidikan FIP
6. Mahasiswa yang bersangkutan
Universitas Negeri Yogyakarta



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)

YOGYAKARTA 55213

open to 2@yahoo.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/V/422/1/2016

Membaca Surat : DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN Nomor : 131/UN34.11/PL/2016
Tanggal : 20 JANUARI 2016 Perihal : IJIN PENELITIAN/RISET

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : HANIFAH YULIANI NIP/NIM : 11101241020
Alamat : FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN , MANAJEMEN PENDIDIKAN , UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Judul : ANALISIS PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR NEGERI NGROJO
Lokasi : DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DIY
Waktu : 21 JANUARI 2016 sd 21 APRIL 2016

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Selda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuh cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 21 JANUARI 2016

A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perkonomian dan Pembangunan



Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. BUPATI KULON PROGO C.Q KPT KULON PROGO
3. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DIY
4. DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN , UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
5. YANG BERSANGKUTAN



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
Unit 1: Jl. Perwakilan No. 1 , Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 775208 Kode Pos 55611
Unit 2: Jl. KHA Dahlan, Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 774402 Kode Pos 55611
Website: bppt.kulonprogokab.go.id Email : bppt@kulonprogokab.go.id

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 070.2 /00045/I/2016.

Memperhatikan : Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi DIY Nomor: 070/REG/V/422/I/2016, TANGGAL: 21 JANUARI 2016, PERIHAL: IZIN PENELITIAN

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 73 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu..

Dilizinkan kepada : **HANIFAH YULIANI**
NIM / NIP : **11101241020**
PT/Instansi : **UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**
Keperluan : **IZIN PENELITIAN**
Judul/Tema : **ANALISIS PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR NEGERI NGROJO**

Lokasi : **SEKOLAH DASAR NEGERI NGROJO NANGGULAN KULON PROGO**

Waktu : **21 Januari 2016 s/d 21 April 2016**

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Wajib memberikan hasil Penelitian/Riset kepada Bupati Kulon Progo c.q. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
4. Izin ini tidak diselenggarakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk kepentingan ilmiah.
5. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menjadi tanggung jawab sepenuhnya peneliti
6. Surat izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
7. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Ditetapkan di : Wates
Pada Tanggal : 21 Januari 2016



Pembina Tk.I ; IV/b

NIP. 19680805 199603 1 005

Tembusan kepada Yth. :

1. Bupati Kulon Progo (Sebagai Laporan)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo
3. Kepala Kantor Kebangsaan Kabupaten Kulon Progo
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo
5. Kepala UPTD PAUD dan DIKDAS Kecamatan Nanggulan
6. Kepala SD Negeri Ngrojo Nanggulan
7. Yang bersangkutan
8. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDIDIKAN
UPTD PAUD DAN DIKDAS KECAMATAN NANGGULAN
SD NEGERI NGROJO

Alamat: Ngrojo, Kembang, Nanggulan, Kulon Progo
e-mail : sdn.ngrojo@gmail.com web: sdnegeringrajo.wordpress.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: 230/Ket/22/I/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kuntadi, S.Ag
NIP : 19640502 198509 1 001
Pangkat/Gol. : Pembina IV/a
Jabatan : Kepala Sekolah

dengan ini menerangkan bahwa nama tersebut di bawah ini telah melakukan kegiatan penelitian skripsi dengan judul "Analisis Pembiayaan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Ngrojo" yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2016 s/d 20 Februari 2016 bertempat di SD Negeri Ngrojo.

Nama : Hanifah Yuliani
NIM : 11101241020
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Yogyakarta

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.



Lampiran 7. Pedoman Wawancara

**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH
DAN BENDAHARA SEKOLAH DI SD NEGERI NGROJO**

Hari/tanggal :

Waktu :

Tempat :

Nama :

Jabatan :

Daftar pertanyaan:

1. Berasal dari mana sajakah sumber dana pendidikan di SD Negeri Ngrojo?
2. Berapakah jumlah dana pendidikan yang diterima SD Negeri Ngrojo?
3. Program apa sajakah yang harus dibiayai oleh SD Negeri Ngrojo?
4. Berapakah jumlah biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh SD Negeri Ngrojo?
5. Apa sajakah hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan SD Negeri Ngrojo?
6. Bagaimanakah usaha sekolah dalam mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo?
7. Bagaimana peran komite sekolah dalam pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo?
8. Apa harapan sekolah terkait dengan keadaan pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo?

Lampiran 8. Pedoman Observasi

PEDOMAN OBSERVASI
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI SD NEGERI NGROJO
NANGGULAN KULON PROGO

Aspek	Keadaan		Keterangan
	Ada	Tidak	
Keadaan Sarana dan Prasarana, yang meliputi : 1. Lahan 2. Bangunan 3. Ruang Kelas 4. Ruang Perpustakaan 5. Laboratorium IPA 6. Ruang Pimpinan 7. Ruang Guru 8. Tempat Beribadah 9. Ruang UKS 10. Jamban 11. Gudang 12. Ruang Sirkulasi 13. Tempat Bermain/Berolahraga			

Lampiran 9. Pedoman Dokumentasi

PEDOMAN DOKUMENTASI
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI SD NEGERI NGROJO
NANGGULAN KULON PROGO

Secara garis besar dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian yang berjudul Pembiayaan Pendidikan di SD Negeri Ngrojo Nanggulan Kulon Progo, meliputi:

Dokumen yang dibutuhkan	Keadaan		Keterangan
	Ada	Tidak	
1. Profil Sekolah 2. Visi, misi, dan tujuan sekolah 3. Struktur Organisasi 4. Keadan Peserta Didik 5. Keadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 6. RKAS 7. Dokumen-dokumen terkait pembiayaan			

Lampiran 10. Analisis Data

ANALISIS DATA MODEL MILES DAN HUBERMAN

1. Transkip dan kumpulan wawancara
2. Kumpulan wawancara, observasi, dan dokumentasi
3. Display Data

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH DI SD NEGERI NGROJO

Hari/tanggal : Jum'at, 29 Januari 2016

Waktu : Pukul 09.00 WIB

Tempat : SD Negeri Ngrojo

Nama : Bapak K

Jabatan : Kepala Sekolah

Hasil Wawancara:

1. Berasal dari mana sajakah sumber dana pendidikan di SD Negeri Ngrojo?

“Pertama, itu kalau yang namanya sekolah itu ada tiga sumber. Satu yang namanya itu BOS Pusat/ BOS reguler, yang kedua itu dari Provinsi, tingkat provinsi yang dinamakan BOSDA, kemudian sumber dana yang ketiga itu dari tingkat II/ Kabupaten itu namanya PBPSD. Jadi tiga sumber itu setiap sekolah itu yang negeri pasti dapat, Mbak”.

2. Berapakah jumlah dana pendidikan yang diterima SD Negeri Ngrojo?

“Untuk tahun ajaran ini dananya berjumlah Rp 40.180.000,00. Dari BOS Reguler Rp 27.800.000,00. Kemudian BOSDA itu jumlahnya Rp 4.480.000,00. Sementara kalau BOS Kabupaten itu jumlahnya sudah ditentukan dari Dinas Pendidikan, Mbak. Untuk BOS Kabupaten lebih jelasnya nanti bisa langsung tanya ke ibu S”.

3. Program apa sajakah yang harus dibiayai oleh SD Negeri Ngrojo?

“Programnya banyak sekali, ada di RKAS. Penggunaan dana berdasarkan SKL, Standar Isi, Standar Proses, PTK, terus Sarpras, terus Pengelolaan, terus Pembiayaan, terus Pendidikan. Delapan standar. Jadi uang itu digunakan untuk delapan standar itu. Rinciannya kan ada.”.

4. Berapakah jumlah biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh SD Negeri Ngrojo?

“Kalau untuk jumlah uangnya saya *ndak* hafal. Banyak sekali, nanti lihat saja ada di laporan. Kan kalau penggunaannya sesuai dengan standar”.

5. Apa sajakah hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan SD Negeri Ngrojo?

“Hambatan dalam pembiayaan itu ya banyak program yang harus dibiayai dan bermacam-macam. Kalau dalam kegiatan belajar mengajar itu ya berjalan lancar biasa, tapi kalau untuk kegiatan di luar seperti tujuhbelasan itu dananya tidak cukup”.

6. Bagaimanakah usaha sekolah dalam mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo?

“Sementara ini ya berusaha mencari dana untuk tambahan. Terkadang menggunakan uang pribadi guru dan iuran guru-guru. Kalau dari guru misal ada kegiatan, guru bawa konsumsi”.

7. Bagaimana peran komite sekolah dalam pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo?

Peran komite dalam pembiayaan ya memberi masukan, mengarahkan, dan mengawasi seperti dalam penyusunan RAPBS/RKAS, Mbak.

8. Apa harapan sekolah terkait dengan keadaan pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo?

“Harapannya ya kalau bisa dana BOS itu disamakan dengan sekolah yang minimal. Contoh begini, seperti tahun 2013 untuk pelaksanaan kurikulum 2013 berapapun muridnya yang kurang dari 80 di-80-kan. Jadi misal satu SD muridnya ada 50 tapi dihitung 80. Harapan saya seperti itu, jadi murid itu dianggap minimal 80. Kalau sekarang kembali ke jumlah siswanya.”.

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN BENDAHARA SEKOLAH DI SD NEGERI NGROJO

Hari/tanggal : Rabu, 27 Januari 2016

Waktu : Pukul 09.00 WIB

Tempat : SD Negeri Ngrojo

Nama : Bapak BK

Jabatan : Bendahara Sekolah

Hasil Wawancara:

1. Berasal dari mana sajakah sumber dana pendidikan di SD Negeri Ngrojo?

“Sumber dananya dari BOS, Mbak. Kan BOS ada 3, BOS Reguler, BOSDA, BOS Kabupaten. Kalau yang saya pegang yang reguler”.

2. Berapakah jumlah dana pendidikan yang diterima SD Negeri Ngrojo?

“Sebentar ya Mbak, saya lihat rekening. Karena muridnya sedikit makanya ya sedikit. Kalau dari BOS Reguler itu hanya 27juta-an, kalau dari BOSDA itu Rp 4.480.000,00 kalau dari BOS Kabupaten saya kurang tahu”.

3. Program apa sajakah yang harus dibiayai oleh SD Negeri Ngrojo?

“Banyak. Kalau dulu ya macam-macam ada untuk kerusakan sekolah, misalnya genting bocor, ada pintu yang rusak”.

4. Berapakah jumlah biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh SD Negeri Ngrojo?

“Kalau untuk jumlahnya ada di laporan”.

5. Apa sajakah hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan SD Negeri Ngrojo?

“Hambatan dalam pembiayaan ya karena dananya sedikit maka tidak bisa membiayai kebutuhan yang mendadak”.

6. Bagaimanakah usaha sekolah dalam mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo?

“Ya kira-kira kita itu ya diminimalisir program-programnya, ya harus dicukup-cukupkan agar program tetap berjalan. Ya prihatin itu. Kan sekolah muridnya

sedikit ya dananya sedikit, kalau lainnya kan muridnya banyak ya dananya banyak, SD lainnya tu mengelolanya enak, nggak banyak-banyak mikir, kalau kita sedikit-sedikit, ya prihatin”.

7. Bagaimana peran komite sekolah dalam pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo?

“Kalau dulu waktu masih ada SPP ya komite sekolah menjadi mediator atau yang menjembatani antara pihak sekolah dengan orangtua siswa, tapi setelah SPP ditiadakan ya paling komite sekolah hanya membantu dalam proses penyusunan RAPBS, mengawasi jalannya pembiayaan, dan memberikan evaluasi dan saran dalam pembiayaan sekolah”.

8. Apa harapan sekolah terkait dengan keadaan pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo?

“Untuk harapannya itu mungkin kalau jumlah muridnya banyak kita kan ada kemajuan, dananya jadi bertambah.”.

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN BENDAHARA SEKOLAH DI SD NEGERI NGROJO

Hari/tanggal : Kamis, 4 Februari 2016
Waktu : Pukul 09.00 WIB
Tempat : SD Negeri Ngrojo
Nama : Bapak AS
Jabatan : Guru yang membantu Bendahara Sekolah

Hasil Wawancara:

1. Berasal dari mana sajakah sumber dana pendidikan di SD Negeri Ngrojo?

“Sumbernya dari BOS Pusat/ BOS Reguler, kemudian BOSDA dari Provinsi, dan BOS Kabupaten”.

2. Berapakah jumlah dana pendidikan yang diterima SD Negeri Ngrojo?

“Jumlah dana, untuk yang mana? BOSDA Provinsi itu total kita dapat selama satu tahun kita dapat Rp 4.840.000,00 untuk BOS Reg itu Rp 27.200.000,00 kalau untuk yang BOS Kabupaten itu sama Ibu ”.

3. Program apa sajakah yang harus dibiayai oleh SD Negeri Ngrojo?

“Kalau dari panduan juknis ya itu kita pakai 8 standar, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan, dan Standar Penilaian Pendidikan, hanya itu. Soal penjabarannya itu banyak sekali. Itu yang dilaporkan ke kabupaten atau ke pusat itu pokoknya ya seperti itu, Mbak”.

4. Berapakah jumlah biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh SD Negeri Ngrojo?

Kalau untuk jumlahnya ada banyak sekali, Mbak. Kita berusaha antara RKAS dengan laporannya itu dibuat sama.

5. Apa sajakah hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan SD Negeri Ngrojo?

“Hambatannya satu, jumlah siswa itu juga berpengaruh. Kalau untuk pembiayaan siswanya sendiri tidak masalah, karena memang sudah dianggarkan sesuai jumlah siswa, lha itu tidak bermasalah. Kalau kegiatan yang di luar sekolah itu yang kendala. Ya intinya kekurangan dana. Selain itu, kegiatan yang bukan berkaitan dengan siswa. Kalau dikaitkan dengan operasional sekolah ya memang bermasalah, jelas jumlah siswanya sedikit ya seperti itu, kekurangan dana”.

6. Bagaimakah usaha sekolah dalam mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo?

“Kalau usaha di luar penggalian dana itu nggak mungkin, ya nggak mungkin kan. Ya usaha kita yang mengoptimalkan apa yang kita punya. Misal, kalau memang dengan BOS Reg itu nggak cukup kita tambah BOSDA, BOSDA kurang cukup pakai BOS Kabupaten. Ya seperti itu. Kalau sekolah negeri itu sulit untuk penggalian dana selain dari ketiga sumber tadi, kalau swasta saya yakin bisa. Ya seperti itu, kita hanya mengoptimalkan yang ada. Kalau misal memang itu belum cukup ya kita istilahnya hutang dulu ke guru-guru. Kalau ada yang berlebih ya kita pinjam dulu, nanti kalau BOS turun kita ganti. Seperti itu. Tapi kalau seperti itu tidak dicatat, hanya dicatat dalam pembukuan bayangan, itu istilahnya hanya teknik operasionalnya saja, kalau pelaporannya ya harus sesuai juknis”.

7. Bagaimana peran komite sekolah dalam pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo?

“Kalau peranan komite dalam pembiayaan pendidikan itu mengawasi dan mengevaluasi, Mbak. Komite sekolah biasanya terlibat dalam rapat-rapat yang diadakan sekolah serta mendiskusikan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan sekolah. Komite juga memberi masukan atau bahan pertimbangan kepada sekolah serta memberi solusi ketika ada masalah”.

8. Apa harapan sekolah terkait dengan keadaan pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo?

“Harapannya kalau bisa distandardkan lagi seperti yang dulu. Jadi antara sekolah yang sedikit siswa dengan yang banyak itu jangan murni sesuai dengan jumlah siswa, tapi ada batas minimal seperti yang dulu. Di bawah 60 dana kita sedikit ada nominal yang distandardkan. Kalau murni sesuai siswa, mohon maaf untuk sekolah yang minim siswa pasti *kelabakan*. Bisa jalan, tapi tetep *terseok-seok* untuk pengelolaan keuangannya”.

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN BENDAHARA SEKOLAH DI SD NEGERI NGROJO

Hari/tanggal : Jum'at, 29 Januari 2016
Waktu : Pukul 10.30 WIB
Tempat : SD Negeri Ngrojo
Nama : Ibu S
Jabatan : Guru yang membantu Bendahara Sekolah

Hasil Wawancara:

1. Berasal dari mana sajakah sumber dana pendidikan di SD Negeri Ngrojo?

“Sumber dana pendidikan disini berasal dari tiga sumber Mbak yaitu BOS Pusat, BOS Provinsi dan BOS Kabupaten”.

2. Berapakah jumlah dana pendidikan yang diterima SD Negeri Ngrojo?

“Untuk tahun 2015 ini dana yang diterima dari BOS Kabupaten itu sebesar Rp 8.140.000,00. Tapi kalau ini tidak terus per anak dapat jatah berapa itu tidak, cuma kita *manud* turunnya itu berapa gitu. Ya Cuma kalau yang jumlah siwanya kecil ya dapatnya kecil”.

3. Program apa sajakah yang harus dibiayai oleh SD Negeri Ngrojo?

“Ada bahan bangunan, upah tukang, ATK, Listrik, Pembersih, honor pengelola, Penggandaan soal-soal UTS maupun Semesteran, dan masih banyak lagi nanti lihat di laporan”.

4. Berapakah jumlah biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh SD Negeri Ngrojo?

“Dari yang BOS Kabupaten hanya Rp 8.138.500 karena tidak bisa dicairkan semua yang untuk upah tukang yaitu sebesar Rp 1.250,00 dari jumlah seharusnya Rp 8.140.000,00”. Kemudian misalnya untuk penggandaan itu Rp 1.200.000 ya, itu kita membiayai yang tidak dapat dari BOS Reg dan BOSDA. Jadi menyisihkan untuk yang memang belum dapat dana. Nanti biasanya uang sekian itu untuk beberapa kali, foto kopi UTS, pokoknya yang tidak dapat biaya dari BOSDA, BOS Reg”.

5. Apa sajakah hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan SD Negeri Ngrojo?

“Hambatannya ya karena sekolah tidak dapat melakukan pungutan terhadap orang tua, sementara dana yang dimiliki sekolah hanya dari pemerintah dan terbatas, sehingga menyebabkan kesulitan dalam pengembangan program sekolah, seperti ekstrakurikuler”.

6. Bagaimakah usaha sekolah dalam mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo?

“Dalam melaksanakan kegiatan ya dengan skala prioritas, yang tidak begitu penting ya tidak dikerjakan, Mbak. Mana yang lebih penting itu yang didahulukan. Kalau mau menuruti kurang ya kurang terus. Selain itu misalnya untuk pembuatan RPP saja ya memakai uang pribadi guru. Mungkin kalau di sekolah lain nanti bisa dimintakan ganti, kalau sini ndak bisa mbak, tidak mampu. Ya semacam itu Mbak, penuh pengorbanan. Kalau sekolah yang banyak dananya ya bisa saja dimintakan ganti, misal untuk penggandaan nanti buat nota, buat ganti. Tapi kalau kita tidak mampu”.

7. Bagaimana peran komite sekolah dalam pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo?

“Kalau peran komite sekolah dalam pembiayaan itu ya diantaranya memberikan pertimbangan, mendukung kegiatan pendidikan dan sebagai penghubung antara sekolah dengan masyarakat, Mbak. Selain itu, kerjasama komite sekolah juga terjalin dalam penyusunan RAPBS sehingga program yang direncanakan dapat terlaksana”.

8. Apa harapan sekolah terkait dengan keadaan pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo?

“Ya harapannya kalau siswanya meningkat otomatis kita dapat biayanya juga meningkat. Itu saja harapannya”.

KUMPULAN HASIL WAWANCARA
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI SD NEGERI NGROJO

Informan	: K = Kepala Sekolah	Waktu/tempat : Jumat, 29 Januari 2016/Ruang Tamu
	BK = Bendahara Sekolah	Rabu, 27 Januari 2016/ Ruang Tamu
	AS = Guru yang membantu Bendahara	Kamis, 4 Februari 2016/ Ruang Tamu
	S = Guru yang membantu Bendahara	Jumat, 29 Januari 2016/Ruang Tamu

Aspek	Informan			
	K	BK	AS	S
Pembayaran Pendidikan				
Sumber dana pendidikan	Pertama, itu kalau yang namanya sekolah itu ada tiga sumber. Satu yang namanya itu BOS Pusat/ BOS reguler, yang kedua itu dari Provinsi, tingkat provinsi yang dinamakan	Sumber dananya dari BOS, Mbak. Kan BOS ada 3, BOS Reguler, BOSDA, BOS Kabupaten.	Sumbernya dari BOS Pusat/ BOS Reguler, kemudian BOSDA dari Provinsi, dan BOS Kabupaten.	Sumber dana pendidikan disini berasal dari tiga sumber Mbak yaitu BOS Pusat, BOS Provinsi dan BOS Kabupaten.

	BOSDA, kemudian sumber dana yang ketiga itu dari tingkat II/ Kabupaten itu namanya PBPSD. Jadi tiga sumber itu setiap sekolah itu yang negeri pasti dapat, Mbak			
KESIMPULAN	Sumber dana pendidikan di SD Negeri Ngrojo berasal dari tiga sumber, yaitu BOS BOS Pusat/ BOS Reguler, BOS Provinsi/ BOSDA dan BOS Kabupaten.			
Jumlah dana yang diterima	Untuk tahun ajaran ini dananya berjumlah Rp 40.180.000,00. Dari BOS Reguler Rp 27.800.000,00. Kemudian BOSDA itu jumlahnya Rp 4.480.000,00. Sementara kalau BOS Kabupaten itu jumlahnya sudah ditentukan dari Dinas	Karena muridnya sedikit makanya ya sedikit. Kalau dari BOS Reguler itu hanya 27juta-an, kalau dari BOSDA itu Rp 4.480.000,00 kalau dari BOS Kabupaten saya kurang tahu.	Jumlah dana, untuk yang mana? BOSDA Provinsi itu total kita dapat selama satu tahun kita dapat Rp 4.840.000,00 untuk BOS Reg itu Rp 27.200.000,00 kalau untuk yang BOS Kabupaten itu sama Ibu Supriyani.	Untuk tahun 2015 ini dana yang diterima dari BOS Kabupaten itu sebesar Rp 8.140.000,00. Tapi kalau ini tidak terus per anak dapat jatah berapa itu tidak, cuma kita <i>manud turunnya</i> itu berapa gitu. Ya Cuma kalau yang jumlah siwanya kecil ya

	Pendidikan, Mbak. Untuk BOS Kabupaten lebih jelasnya nanti bisa langsung tanya ke ibu S			dapatnya kecil.
KESIMPULAN	Jumlah dana pendidikan yang diterima SD Negeri Ngrojo untuk tahun 2015 ini BOS Pusat adalah sebesar Rp 27.200.000,00 kemudian untuk BOS Provinsi sebesar Rp 4.840.000,00 dan untuk BOS Kabupaten adalah sebesar Rp 8.140.000,00.			
Program yang harus dibiayai	Programnya banyak sekali, ada di RKAS. Penggunaan dana berdasarkan SKL, Standar Isi, Standar Proses, PTK, terus Sarpras, terus Pengelolaan, terus Pembiayaan, terus Pendidikan. Delapan standar. Jadi uang itu digunakan untuk delapan standar itu. Rinciannya kan ada.	Seperti apa ya, seperti pajak. Banyak. Kalo BOSDA yang megang itu Pak Sigit. Saya <i>ndak</i> megang. Saya dulu kalau megang kan banyak sekali, kalau sekarang sudah tua ya dibagi-bagi. Kalau dulu ya macam-macam ada untuk kerusakan sekolah, misalnya genting bocor, ada pintu	Kalau dari panduan juknis ya itu kita pakai 8 standar, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan, dan Standar Penilaian Pendidikan,	Ada bahan bangunan, upah tukang, ATK, Listrik, Pembersih, honor pengelola, Penggandaan soal-soal UTS maupun Semesteran, dan masih banyak lagi nanti lihat di laporan.

		yang rusak.	hanya itu. Soal penjabarannya itu banyak sekali. Itu yang dilaporkan ke kabupaten atau ke pusat pokoknya ya seperti itu, Mbak.	
KESIMPULAN	Program sekolah yang harus dibiayai oleh SD Negeri Ngrojo berdasarkan 8 standar, yaitu Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan, dan Standar Penilaian Pendidikan.			
Jumlah biaya yang dikeluarkan	Kalau untuk jumlah uangnya saya <i>ndak</i> hafal. Banyak sekali, nanti lihat saja ada di laporan.	Kalau untuk jumlahnya ada di laporan.	Kalau untuk jumlahnya ada banyak sekali, Mbak. Kita berusaha antara RKAS dengan laporannya itu dibuat sama.	Dari yang BOS Kabupaten hanya Rp 8.138.500 karena tidak bisa dicairkan semua yang untuk upah tukang yaitu sebesar Rp 1.250,00 dari jumlah seharusnya Rp 8.140.000,00". Kemudian misalnya untuk penggandaan itu Rp

				1.200.000 ya, itu kita membiayai yang tidak dapat dari BOS Reg dan BOSDA. Jadi menyisihkan untuk yang memang belum dapat dana. Nanti biasanya uang sekian itu untuk beberapa kali, foto kopi UTS, pokoknya yang tidak dapat biaya dari BOSDA, BOS Reg.
KESIMPULAN	Jumlah biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh SD Negeri Ngrojo jumlahnya hampir sama antara RKAS dan laporannya.			
Hambatan Pembiayaan Pendidikan				
Hambatan dalam pembiayaan pendidikan	Hambatan dalam pembiayaan itu ya banyak program yang harus dibiayai dan bermacam-macam. Kalau dalam	Hambatan dalam pembiayaan ya karena dananya sedikit maka tidak bisa membiayai kebutuhan yang	Hambatannya satu, jumlah siswa itu juga berpengaruh. Kalau untuk pembiayaan siswanya sendiri tidak masalah,	Hambatannya ya karena sekolah tidak dapat melakukan pungutan terhadap orang tua, sementara dana yang

	<p>kegiatan belajar mengajar itu ya berjalan lancar biasa, tapi kalau untuk kegiatan di luar seperti tujuhbelasan itu dananya tidak cukup.</p>	<p>mendadak.</p>	<p>karena memang sudah dianggarkan sesuai jumlah siswa, lha itu tidak bermasalah. Kalau kegiatan yang di luar sekolah itu yang kendala. Ya intinya kekurangan dana. Selain itu, kegiatan yang bukan berkaitan dengan siswa. Kalau dikaitkan dengan operasional sekolah ya memang bermasalah, jelas jumlah siswanya sedikit ya seperti itu, kekurangan dana.</p>	<p>dimiliki sekolah hanya dari pemerintah dan terbatas, sehingga menyebabkan kesulitan dalam pengembangan program sekolah, seperti ekstrakurikuler.</p>
KESIMPULAN	<p>Hambatan dalam pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo ini adalah sekolah tidak dapat melakukan pungutan, di sisi lain dana yang dimiliki hanya terbatas sehingga menyebabkan kesulitan dalam pengembangan program sekolah serta banyaknya program yang harus dibiayai dengan dana yang dimiliki sekolah.</p>			

<p>Usaha sekolah dalam mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pemberian pendidikan</p>	<p>Sementara ini ya berusaha mencari dana untuk tambahan. Terkadang menggunakan uang pribadi guru dan iuran guru-guru. Kalau dari guru misal ada kegiatan, guru bawa konsumsi.</p>	<p>Ya kira-kira kita itu ya diminimalisir program-programnya, ya harus dicukup-cukupkan agar program tetap berjalan. Ya prihatin itu. Kan sekolah muridnya sedikit ya dananya sedikit, kalau lainnya kan muridnya banyak ya dananya banyak, SD lainnya tu mengelolanya enak, nggak banyak-banyak mikir, kalau kita sedikit-sedikit, ya prihatin.</p>	<p>Kalau usaha di luar penggalian dana itu nggak mungkin, ya nggak mungkin kan. Ya usaha kita yang mengoptimalkan apa yang kita punya. Misal, kalau memang dengan BOS Reg itu nggak cukup kita tambah BOSDA, BOSDA kurang cukup pakai BOS Kabupaten. Ya seperti itu. Kalau sekolah negeri itu sulit untuk penggalian dana selain dari ketiga sumber tadi, kalau swasta saya yakin bisa. Ya seperti itu, kita hanya mengoptimalkan yang ada.</p>	<p>Dalam melaksanakan kegiatan ya dengan skala prioritas, yang tidak begitu penting ya tidak dikerjakan, Mbak. Mana yang lebih penting itu yang didahulukan. Kalau mau menuruti kurang ya kurang terus. Selain itu misalnya untuk pembuatan RPP saja ya memakai uang pribadi guru. Mungkin kalau di sekolah lain nanti bisa dimintakan ganti, kalau sini ndak bisa mbak, tidak mampu. Ya semacam itu Mbak, penuh pengorbanan. Kalau sekolah yang banyak</p>
--	--	--	---	---

			Kalau misal memang itu belum cukup ya kita istilahnya hutang dulu ke guru-guru. Kalau ada yang berlebih ya kita pinjam dulu, nanti kalau BOS turun kita ganti. Seperti itu. Tapi kalau seperti itu tidak dicatat, hanya dicatat dalam pembukuan bayangan, itu istilahnya hanya teknik operasionalnya saja, kalau pelaporannya ya harus sesuai juknis.	dananya ya bisa saja dimintakan ganti, misal untuk penggandaan nanti buat nota, buat ganti. Tapi kalau kita tidak mampu.
KESIMPULAN	Upaya yang dilakukan sekolah dalam mengatasi hambatan yang ada yaitu dengan berusaha meminimalisir pengeluaran dana dan dengan skala prioritas yaitu mendahulukan program yang lebih penting serta berusaha mengoptimalkan apa yang ada.			
Peran Komite Sekolah	Peran komite dalam	Kalau dulu waktu masih	Kalau peranan komite	Kalau peran komite

	pembangunan yang memberi masukan, mengarahkan, dan mengawasi seperti dalam penyusunan RAPBS, Mbak.	ada SPP ya komite sekolah menjadi mediator atau yang menjembatani antara pihak sekolah dengan orangtua siswa, tapi setelah SPP ditiadakan ya paling komite sekolah hanya membantu dalam proses penyusunan RAPBS, mengawasi jalannya pembangunan, dan memberikan evaluasi dan saran dalam pembangunan sekolah.	dalam pembangunan pendidikan itu mengawasi dan mengevaluasi, Mbak. Komite sekolah biasanya terlibat dalam rapat-rapat yang diadakan sekolah serta mendiskusikan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan sekolah. Komite juga memberi masukan atau bahan pertimbangan kepada sekolah serta memberi solusi ketika ada masalah.	sekolah dalam pembangunan itu ya diantaranya memberikan pertimbangan, mendukung kegiatan pendidikan dan sebagai penghubung antara sekolah dengan masyarakat, Mbak. Selain itu, kerjasama komite sekolah juga terjalin dalam penyusunan RAPBS sehingga program yang direncanakan dapat terlaksana.
KESIMPULAN	Peran komite sekolah dalam pembangunan pendidikan di SD Negeri Ngrojo yaitu memberi masukan atau arahan, mengawasi dan mengevaluasi. Selain itu, komite sekolah menjadi penghubung antara sekolah dengan masyarakat agar terjalin kerjasama yang baik.			
Harapan Sekolah	Harapannya ya kalau bisa	Untuk harapannya itu	Harapannya kalau bisa	Ya harapannya kalau

	<p>dana BOS itu disamakan dengan sekolah yang minimal. Contoh begini, seperti tahun 2013 untuk pelaksanaan kurikulum 2013 berapapun muridnya yang kurang dari 80 di-80-kan. Jadi misal satu SD muridnya ada 50 tapi dihitung 80. Harapan saya seperti itu, jadi murid itu dianggap minimal 80. Kalau sekarang kembali ke jumlah siswanya.</p>	<p>mungkin kalau jumlah muridnya banyak kita kan ada kemajuan, dananya jadi bertambah.</p>	<p>distanدارkan lagi seperti yang dulu. Jadi antara sekolah yang sedikit siswa dengan yang banyak itu jangan murni sesuai dengan jumlah siswa, tapi ada batas minimal seperti yang dulu. Di bawah 60 dana kita sedikit ada nominal yang distandarkan. Kalau murni sesuai siswa, mohon maaf untuk sekolah yang minim siswa pasti kelabakan. Bisa jalan, tapi tetep kesulitan untuk pengelolaan keuangannya.</p>	<p>siswanya meningkat otomatis kita dapat biayanya juga meningkat. Itu saja harapannya</p>
KESIMPULAN	<p>Harapan sekolah dalam pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo adalah agar jumlah siswa di sekolah tersebut meningkat sehingga dana yang diterima juga meningkat. Selain itu, harapan lainnya adalah agar pemberian dana</p>			

	tersebut seperti tahun 2013 distandarkan, sekolah yang sedikit siswa dengan yang banyak siswa jangan murni sesuai dengan jumlah siswa, tetapi harus ada batas minimal seperti dahulu.
--	---

HASIL OBSERVASI
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI SD NEGERI NGROJO
NANGGULAN KULON PROGO

Hari : Senin-Selasa
 Tanggal : 25-26 Januari 2016
 Pukul : 08.00 WIB s.d selesai
 Tempat : SD Negeri Ngrojo

Aspek yang diamati	Ada	Tidak	Keterangan
Lahan	√		Untuk SD yang memiliki kurang dari 15 siswa per rombongan belajar, lahan SD Negeri Ngrojo sudah memenuhi ketentuan luas minimum seperti tercantum dalam Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI.
Bangunan	√		Dilihat dari luar, bangunan SD Negeri Ngrojo tampak bagus dan baru saja direhab/diperbaiki, cat temboknya masih baru, namun bila dilihat secara menyeluruh sampai ke dalam masih ada beberapa ruangan yang terlihat tidak terawat dan berantakan.
Ruang Kelas	√		Beberapa ruang kelas yang ada di SD Negeri Ngrojo terlihat tidak terawat dan tidak nyaman digunakan untuk kegiatan belajar mengajar karena perabotan yang ada di dalamnya tergolong sangat minim tidak tertata, selain itu ada beberapa ruang kelas yang bersampingan langsung dengan

			gudang dan hanya disekat menggunakan papan.
Ruang Perpustakaan	√		Ruang perpustakaan di SD Negeri Ngrojo ada, namun keadaannya sangat memprihatinkan. Di dalamnya terdapat buku-buku yang sudah tidak digunakan serta perabotan sekolah yang sudah tidak terpakai bahkan ruang tersebut tidak terlihat seperti gudang.
Laboratorium IPA		√	SD Negeri Ngrojo ini tidak memiliki laboratorium IPA.
Ruang Pimpinan	√		Ruang pimpinan/ kepala sekolah menjadi satu dengan ruang guru dan ruang tamu namun ada sekat/pembatas antara masing-masing ruang.
Ruang Guru	√		Ruang guru di SD Negeri Ngrojo menjadi satu dengan ruang tamu dan ruang kepala sekolah namun diberi sekat/pembatas antara masing-masing ruang.
Tempat Beribadah	√		Tempat beribadah/ mushola yang ada di SD Negeri Ngrojo merupakan bangunan baru, namun kondisinya tidak ada jendela dan pintunya (hanya kusen saja).
Ruang UKS		√	Tidak terdapat ruang UKS di sekolah ini, namun terdapat ruang alat peraga yang dijadikan untuk ruang UKS

			yang di dalamnya terdapat tempat tidur, keadaannya sangat minim bahkan karena memang awalnya adalah tempat penyimpanan alat peraga olahraga maka di dalamnya digunakan untuk menyimpan papan catur, bet tenis meja, dan peralatan lainnya. Ruangan ini terlihat seperti gudang, karena benda-benda di dalamnya tidak tertata.
Jamban	√		Di sekolah ini hanya terdapat 1 toilet untuk guru dan 1 toilet untuk siswa.
Gudang	√		Di sekolah ini terdapat gudang yang letaknya bersebelahan dengan ruang perpustakaan. Keadaan gudang tersebut tidak tertata.
Ruang Sirkulasi	√		Ruang sirkulasi di sekolah ini membentuk garis lurus karena bentuk bangunannya menyerupai huruf I, lantainya keramik dan terlihat seperti belum lama direhab.
Tempat bermain/olahraga	√		Di sekolah ini terdapat tempat terbuka yang bisa digunakan sebagai tempat bermain/olahraga maupun tempat upacara.
Kantin Sekolah	√		Kantin sekolah disekolah ini hanya berupa sebuah meja yang di atasnya terdapat beberapa macam makanan dan letak meja tersebut berada di samping mushola.

HASIL STUDI DOKUMENTASI
ANALISIS PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI SD NEGERI NGROJO

Hari, Tanggal : Kamis, 28 Januari 2016

Pukul : 09.00 WIB s.d selesai

Tempat : Ruang Tamu SD Negeri Ngrojo

No	Aspek	Ada	Tidak	Keterangan
1	Profil Sekolah	√		Berupa dokumen yang didalamnya berisi tentang identitas sekolah.
2	Visi, misi, dan tujuan sekolah	√		Berupa dokumen yang menjelaskan mengenai visi dan misi sekolah. namun sayangnya di dalam dokumen tersebut tidak disebutkan mengenai tujuan sekolah, hanya visi dan misi sekolah saja.
3	Struktur Organisasi	√		Berisi tentang tugas-tugas pokok dan fungsi dari para pengurus sekolah.
4	Rekapitulasi Jumlah Siswa	√		Berisi tentang jumlah siswa yang ada di sekolah tersebut. Siswa di SD Negeri Ngrojo pada tahun ajaran 2015/2016 berjumlah 35 siswa, yaitu 19 siswa perempuan dan 16 siswa laki-laki.
5	Keadaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	√		Berisi tentang nama-nama guru beserta pendidikan

				terakhir dan jabatan.
6	RAPBS/APBS	√		Berisi tentang rencana anggaran dan belanja sekolah.
7.	Dokumen-dokumen terkait pembiayaan	√		Foto-foto sarana dan prasarana.

Kumpulan Hasil Wawancara, Observasi dan Studi Dokumentasi

Analisis Pembiayaan Pendidikan di SD Negeri Ngrojo

A. Sumber Dana Pendidikan

Wawancara: Sumber dana pendidikan di SD Negeri Ngrojo berasal dari tiga sumber, yaitu BOS BOS Pusat/ BOS Reguler, BOS Provinsi/ BOSDA dan BOS Kabupaten.

Studi Dokumentasi: Berdasarkan hasil studi dokumen yang dilakukan oleh peneliti, dalam dokumen RKAS disebutkan bahwa sumber pendidikan SD Negeri Ngrojo berasal dari ketiga sumber tersebut, yaitu BOS Pusat, BOS Provinsi dan BOS Kabupaten.

B. Jumlah Dana Pendidikan Yang Diterima

Wawancara: Jumlah dana pendidikan yang diterima SD Negeri Ngrojo untuk tahun ajaran 2015/2016 adalah Rp 40.180.000 yang berasal ini BOS Pusat adalah sebesar Rp 27.200.000,00 kemudian untuk BOS Provinsi sebesar Rp 4.840.000,00 dan untuk BOS Kabupaten adalah sebesar Rp 8.140.000,00.

Studi Dokumentasi: berdasarkan hasil studi dokumen yang dilakukan oleh peneliti, dalam dokumen RKAS dituliskan bahwa jumlah dana yang diterima sebesar Rp 40.180.000,00 yang berasal dari BOS Pusat adalah sebesar Rp 27.200.000,00, BOS Provinsi sebesar Rp 4.840.000,00 dan BOS Kabupaten adalah sebesar Rp 8.140.000,00.

C. Program Yang Harus Dibiayai

Wawancara: program sekolah yang harus dibiayai oleh SD Negeri Ngrojo berdasarkan 8 standar, yaitu Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan, dan Standar Penilaian Pendidikan.

Studi Dokumentasi: Dalam dokumen RKAS tercantum program-program yang harus dibiayai, diantaranya memuat 8 standar yaitu Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar

Pembiayaan Pendidikan, dan Standar Penilaian Pendidikan yang masing-masing ada penjabarannya.

Observasi: dalam RKAS/RAPBS maupun APBS disebutkan bahwa dana pendidikan digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana sekolah, seperti perawatan ruang kelas, ruang perpustakaan. Namun dalam hasil observasi peneliti, masih ditemukan beberapa ruang kelas dan ruang perpustakaan yang kondisinya sangat memprihatinkan.

D. Jumlah Biaya Pendidikan Yang Dikeluarkan

Wawancara: jumlah biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh SD Negeri Ngrojo biasanya hampir sama antara RKAS dan laporannya.

Sudi Dokumentasi: dalam dokumen RKAS tercantum jumlah pembiayaan program-program, sebagai berikut:

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran
1.	Standar Kompetensi Lulusan	Rp 3.664.050
2.	Standar Isi	Rp 1.429.750
3.	Standar Proses	Rp 6.069.350
4.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp 0
5.	Standar Sarana dan Prasarana	Rp 8.854.050
6.	Standar Pengelolaan	Rp 2.175.000
7.	Standar Pembiayaan Pendidikan	Rp11.179.900
8.	Standar Penilaian Pendidikan	Rp 6.807.900

E. Hambatan Yang Dihadapi

Wawancara: hambatan dalam pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo ini adalah sekolah tidak dapat melakukan pungutan, di sisi lain dana yang dimiliki hanya terbatas sehingga menyebabkan kesulitan dalam pengembangan program sekolah serta banyaknya program yang harus dibiayai dengan dana yang dimiliki sekolah.

F. Upaya Mengatasi Hambatan

Wawancara: upaya yang dilakukan sekolah dalam mengatasi kendala yang ada yaitu dengan berusaha meminimalisir pengeluaran dana dan dengan skala prioritas yaitu mendahulukan program yang lebih penting serta berusaha mengoptimalkan apa yang ada.

G. Peran Komite Sekolah

Wawancara: Peran komite sekolah dalam pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo yaitu memberi masukan atau arahan, mengawasi dan mengevaluasi. Selain itu, komite sekolah menjadi penghubung antara sekolah dengan masyarakat agar terjalin kerjasama yang baik.

H. Harapan Sekolah

Wawancara: harapan sekolah dalam pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo adalah agar jumlah siswa di sekolah tersebut meningkat sehingga dana yang diterima juga meningkat. Selain itu, harapan lainnya adalah agar pemberian dana tersebut distandarkan seperti tahun 2013, sekolah yang sedikit siswa dengan yang banyak siswa jangan murni sesuai dengan jumlah siswa, tapi harus ada batas minimal.

Display Data
Pembiayaan Pendidikan di SD Negeri Ngrojo
Nanggulan Kulon Progo

A. Sumber Dana Pendidikan

Sumber dana pendidikan di SD Negeri Ngrojo berasal dari tiga sumber, yaitu BOS BOS Pusat/ BOS Reguler, BOS Provinsi/ BOSDA dan BOS Kabupaten. Berdasarkan hasil studi dokumen dalam dokumen APBS disebutkan bahwa sumber pendidikan SD Negeri Ngrojo berasal dari tiga sumber, yaitu BOS Pusat, BOS Provinsi dan BOS Kabupaten.

B. Jumlah Dana Pendidikan Yang Diterima

Jumlah dana pendidikan yang diterima SD Negeri Ngrojo untuk tahun ajaran 2015/2016 adalah Rp 40.180.000,00 yang berasal dari ini BOS Pusat adalah sebesar Rp 27.200.000,00 kemudian untuk BOS Provinsi sebesar Rp 4.840.000,00 dan untuk BOS Kabupaten adalah sebesar Rp 8.140.000,00.

C. Program Yang Dibiayai

Program sekolah yang dibiayai oleh SD Negeri Ngrojo berdasarkan standar nasional pendidikan, yaitu Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan, dan Standar Penilaian Pendidikan, kecuali Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Dalam dokumen RKAS tercantum program-program yang harus dibiayai, diantaranya yaitu Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan, dan Standar Penilaian Pendidikan yang masing-masing ada penjabarannya. Sementara itu, berdasarkan hasil observasi peneliti, masih ditemukan beberapa sarana prasarana seperti ruang kelas dan ruang perpustakaan yang kondisinya sangat memprihatinkan.

D. Jumlah Biaya Pendidikan Yang Dikeluarkan

Dalam dokumen RKAS tercantum jumlah pembiayaan program-program, antara lain Standar Kompetensi Lulusan dianggarkan sebesar Rp

3.664.050, Standar Isi sebesar Rp 1.429.750, Standar Proses sebesar Rp 6.069.350, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp 0, Standar Sarana dan Prasarana sebesar Rp 8.854.050, Standar Pengelolaan sebesar Rp 2.175.000, Standar Pembiayaan Pendidikan sebesar Rp 11.179.900, dan Standar Penilaian Pendidikan sebesar Rp 6.807.900.

E. Hambatan Yang Dihadapi

Hambatan dalam pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo ini adalah sekolah tidak dapat melakukan pungutan, di sisi lain dana yang dimiliki hanya terbatas sehingga menyebabkan kesulitan dalam pengembangan program sekolah serta banyaknya program yang harus dibiayai dengan dana yang dimiliki sekolah.

F. Upaya Mengatasi Kendala

Upaya yang dilakukan sekolah dalam mengatasi kendala yang ada yaitu dengan berusaha meminimalisir pengeluaran dana dan dengan skala prioritas yaitu mendahulukan program yang lebih penting serta berusaha mengoptimalkan apa yang ada.

G. Peran Komite Sekolah

Peran komite sekolah dalam pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo yaitu memberi masukan atau arahan, mengawasi dan mengevaluasi. Selain itu, komite sekolah menjadi penghubung antara sekolah dengan masyarakat agar terjalin kerjasama yang baik.

H. Harapan Sekolah

Harapan sekolah dalam pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo adalah agar jumlah siswa di sekolah tersebut meningkat sehingga dana yang diterima juga meningkat. Selain itu, harapan lainnya adalah agar pemberian dana tersebut distandarkan seperti tahun 2013, sekolah yang sedikit siswa dengan yang banyak siswa tidak murni sesuai dengan jumlah siswa, tetapi harus ada batas minimal.

Lampiran 11. Dokumentasi Foto



Gambar 1. Keadaan Ruang Kelas



Gambar 2. Keadaan Ruang Kelas



Gambar 3. Ruang Perpustakaan Tampak Luar



Gambar 4. Ruang Perpustakaan Tampak Dalam



Gambar 5. Ruang Kepala Sekolah



Gambar 6. Ruang Guru



Gambar 7. Tempat Ibadah/ Mushola



Gambar 8. Ruang UKS



Gambar 9. Wc/ Kamar Mandi



Gambar 10. Kantin Sekolah